

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### 4.1 Deskripsi Lokasi dan Objek Penelitian

#### 4.1.1 Gambaran Umum Kartu Kredit Pemerintah di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)



**Gambar 4.1** Logo BNPP RI

*(bnpp.go.id, 2023)*

Pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia resmi membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan Presiden Nomor 12. Sejak didirikan, BNPP RI telah berkontribusi dalam berbagai upaya untuk memperkuat dan memajukan wilayah perbatasan Indonesia, seperti:

- Membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang modern dan representatif.
- Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas publik di kawasan perbatasan.
- Memperkuat perekonomian masyarakat perbatasan melalui berbagai program pemberdayaan.
- Meningkatkan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam pengelolaan perbatasan.

BNPP terus berkomitmen untuk mewujudkan perbatasan negara yang aman, damai, dan sejahtera, serta menjadi simbol kehadiran negara di wilayah terdepan Indonesia. Berikut adalah peran BNPP dalam pengelolaan perbatasan negara:

- Penyelenggaraan pembangunan perbatasan. BNPP menjadi koordinator dalam penyelenggaraan pembangunan perbatasan. BNPP bersinergi dengan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan perbatasan, melaksanakan pembangunan, dan mengevaluasi hasil pembangunan.
- Penjagaan dan penegakan kedaulatan negara. BNPP berperan dalam menjaga dan menegakkan kedaulatan negara di wilayah perbatasan. BNPP bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mengamankan wilayah perbatasan dari berbagai ancaman, seperti penyelundupan, perdagangan ilegal, dan terorisme.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. BNPP berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. BNPP berfokus pada pengembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di wilayah perbatasan.
- Peningkatan kerja sama dengan negara tetangga. BNPP berperan dalam meningkatkan kerja sama dengan negara tetangga dalam pengelolaan perbatasan. BNPP bekerja sama dengan kementerian luar negeri untuk membangun hubungan baik dengan negara tetangga.

BNPP RI merupakan lembaga penting dalam pengelolaan perbatasan negara. BNPP RI berperan dalam mewujudkan perbatasan negara yang aman, damai, dan sejahtera. Dalam praktiknya Kartu Kredit Pemerintah (KKP) membawa berbagai manfaat, termasuk:

### **1. Meminimalisir penggunaan uang tunai dalam transaksi.**

Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tentu saja membawa manfaat positif dalam mempercepat pelaksanaan aktivitas. Ini disebabkan oleh tidak perlu membawa uang tunai saat bertransaksi dalam tugas dinas, dan selain itu, penggunaan KKP juga memberikan fleksibilitas dalam penggunaannya.

### **2. Meningkatkan keamanan dalam bertransaksi**

Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) membantu mengurangi potensi risiko yang tidak diharapkan, seperti kehilangan atau pencurian yang nantinya akan menjadi tanggung jawab bendahara. Dengan demikian, penggunaan

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) memberikan perlindungan terhadap kejadian yang tidak diinginkan.

### 3. Mengurangi potensi penipuan /*fraud* dalam transaksi non-tunai

Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) memiliki potensi untuk mengurangi risiko kecurangan, karena setiap transaksi yang dilakukan oleh entitas pemerintah akan secara otomatis terdeteksi dan terdokumentasi. Ini berarti bahwa jika terdapat tindakan penyalahgunaan anggaran atau pelanggaran, jejaknya akan tercatat secara rinci dan tidak dapat dimanipulasi. Oleh karena itu, KKP dapat mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas, karena semua transaksi dicatat secara teratur dan otomatis. Selain itu, KKP juga dapat digunakan sebagai alat pengawasan oleh atasan dan menyederhanakan pengelolaan keuangan.

### 4. Mengurangi *idle cash* dari penggunaan Uang Persediaan (UP)

Penggunaan Uang Persediaan (UP) dalam bentuk tunai, selain berisiko tinggi dari segi keamanan, juga dapat mengakibatkan dana yang tidak digunakan dalam waktu dekat, yang dikenal sebagai *idle cash*. Perlu diketahui bahwa *idle cash* adalah dana yang tidak produktif dan tidak efisien dalam pengelolaan keuangan. Jika banyak satuan kerja memiliki *idle cash*, maka jumlah dana pemerintah yang menganggur tanpa digunakan akan menjadi besar. Oleh karena itu, pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dapat membantu mengurangi Uang Persediaan (UP) yang dibiarkan mengendap di bendahara pengeluaran.<sup>48</sup>

Pemanfaatan kartu kredit oleh pemerintah dapat membawa banyak manfaat, termasuk peningkatan efisiensi, transparansi, dan manajemen risiko keuangan. Namun, pemerintah juga harus berhati-hati dalam mengelola penggunaan kartu kredit agar tidak menimbulkan masalah seperti utang yang tidak terkendali. Penggunaan kartu kredit pemerintah harus selalu didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat. Dengan demikian, kartu kredit dapat menjadi alat yang kuat dalam pengelolaan keuangan publik yang lebih praktis.

---

<sup>48</sup>Kemenkeu RI, 'Kartu Kredit Pemerintah, Langkah Ideal Di Era Milenial', <<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2841-kartu-kredit-pemerintah,-langkah-ideal-di-era-milenial.html>>.



**Gambar 4.2** Bentuk KKP Belanja Perjalanan Dinas di BNPP RI

*(Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, 2023)*

Berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) No.10/2016 yang memuat arahan untuk mempercepat implementasi transaksi non-tunai di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda), Peraturan Edaran Dalam Negeri No. 910/1867/SJ tentang transaksi non-tunai pada instansi pemerintah, dan PMK 196/05/2018. Pada peraturan tersebut telah mendorong penggunaan transaksi non-tunai di Kawasan pemerintahan yang salah satu programnya adalah Kartu Kredit Pemerintah yang dimana telah didorong oleh Kementerian Keuangan agar Kementerian dan Lembaga yang berada di Pusat untuk segera melakukan penerbitan atau memanfaatkan program Kartu Kredit Pemerintah. Dengan demikian, seluruh Kementerian dan Lembaga secara serentak melakukan penerbitan kepada Bank yang bekerjasama pada tahun 2019, salah satunya adalah BNPP RI.

Penggunaan digitalisasi tentunya tidak jauh dengan adanya *cyber crime*, ancaman tersebut tentunya memerlukan adanya tindakan pencegahan, sehingga diperlukannya sebuah pencegahan, terutama pada Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tentunya akan lebih mudah untuk dibawa dan terhindar dari resiko pencurian atau kehilangan. Berikut beberapa pencegahan yang harus dilakukan oleh pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP):

1. Rutin mengganti PIN Kartu Kredit Pemerintah (KKP) secara berkala,
2. Diperlukan untuk menghapus cache saat melakukan transaksi dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) secara online, baik melalui perangkat komputer, tablet, atau ponsel,

3. Hindari mengklik tautan atau lampiran yang berasal dari sumber yang tidak jelas atau yang dikirimkan oleh pihak yang tidak dikenal, terutama melalui email, WhatsApp, dan berbagai aplikasi media sosial, dan
4. Selalu tetap waspada terhadap berbagai metode penipuan yang mungkin terjadi, termasuk modus penipuan sosial dan tindak kejahatan dunia maya lainnya.



**Gambar 4.3** Surat Permohonan Penerbitan KKP 2019

(Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, 2023)

Berdasarkan pada data di atas bahwa BNPP RI menjadi salah satu yang taat mengikuti peraturan dengan menerbitkan 19 (Sembilan belas) Kartu Kredit Pemerintah kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di BNPP RI. Berikut jabatan pemegang Kartu Kredit Pemerintah di BNPP RI di tahun 2019, yaitu:

1. BPP pada Biro Keuangan, Umum, dan Humas
2. BPP Biro Perencanaan dan Kerjasama
3. BPP pada Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian
4. BPP pada Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat
5. BPP pada Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara
6. BPP pada Asdep Pengelolaan Lintas Batas Negara
7. BPP pada Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Laut
8. BPP pada Asdep Penataan Ruang Kawasan Perbatasan
9. BPP pada Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Laut
10. BPP pada Asdep Infrastruktur Fisik

11. BPP pada Asdep Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
12. BPP pada Asdep Infrastruktur Pemerintahan
13. BPP pada PLBN Entikong
14. BPP pada PLBN Aruk
15. BPP pada PLBN Badau
16. BPP pada PLBN Motaain
17. BPP pada PLBN Wini
18. BPP pada PLBN Motamasin
19. BPP pada PLBN Skouw

Akan tetapi Kartu Kredit Pemerintah di BNPP RI belum melakukan aktivasi, sehingga KKP belum terlaksana di BNPP RI. Sehingga, diputuskan untuk menutup KKP tersebut.



**Gambar 4.4** Surat Permohonan Penutupan KKP di Tahun 2023

*(Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, 2023)*

Pada data di atas diketahui bahwa di tanggal 16 Maret 2023, BNPP RI membuat surat permohonan untuk menutup Kartu Kredit Pemerintah kepada Bank Negara Indonesia (BNI). Sehingga, dilakukannya penutupan pada penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di BNPP RI disebabkan sudah banyaknya BPP yang telah berotasi atau pindah dari BNPP RI dan tidak terpakainya kartu tersebut untuk pelaksanaan kegiatan perbatasan di BNPP RI. Selanjutnya BNPP RI melakukan pembukaan kembali Kartu Kredit Pemerintah yang berdasarkan pada data di bawah ini.





**Gambar 4.5** Surat Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2023  
(Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, 2023)

Berdasarkan pada data di atas diketahui pada tanggal 17 Oktober 2023, telah terbitnya surat permohonan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah. Berikut pemegang Kartu Kredit Pemerintah terbaru:

1. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Biro Keuangan, Umum dan Humas, Sekretariat BNPP
2. JFU pada Biro Keuangan, Umum, dan Humas

Berdasarkan kepada data-data diatas diketahui bahwa adanya penurunan penerbitan dari penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Hal tersebut diperkuat adanya monitoring dari KPPN. Berikut monitoring dari KPPN yang telah diisi oleh Bendahara Pengeluaran, bahwa terdapat kendala pemanfaatan KKP yang terjadi di BNPP RI:

**MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KARTU KREDIT PEMERINTAH TRIWULAN IV TAHUN 2023 TINGKAT KPPN**

\* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

**SURAT PERSETUJUAN / PERUBAHAN PERSETUJUAN BESARAN UP KARTU KREDIT PEMERINTAH EXISTING**

Diisi dengan surat persetujuan/perubahan persetujuan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah yg sudah ada sebelum Kartu Kredit Pemerintah Domestik

**HAMBATAN DAN KENDALA KARTU KREDIT PEMERINTAH EXISTING**

Hambatan dan Kendala dalam pelaksanaan pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah

Diisi dengan hambatan dan kendala selama pelaksanaan pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah. Jawaban dapat lebih dari satu.

- Limit kartu kredit yang terlalu kecil
- Tidak bisa meminta tagihan sementara
- Tagihan Kartu Kredit tidak bisa dilihat secara realtime
- Pengiriman tagihan terlambat
- Kesulitan mencari merchant/Merchant terbatas
- Penggunaan Kartu Kredit dikenakan Charge/biaya administrasi/bea materai
- Belum memahami penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
- Mutasi Pegawai sehingga harus melakukan PKS ulang dengan Bank
- Yang lain: \_\_\_\_\_

Kembali    Berikutnya    Kosongkan formulir

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

**Gambar 4. 6** Monitoring dan Evaluasi Kartu Kredit Pemerintah Tingkat KPPN  
(Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, 2023)

Berdasarkan Pada monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KPPN, BNPP RI memiliki hambatan dalam pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yaitu:

1. Tagihan Kartu Kredit Pemerintah tidak dapat dilihat secara langsung atau *realtime*. Pada dasarnya Bendahara Pengeluaran hanya dapat melihat tagihan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di setiap bulannya, Bendahara Pengeluaran tidak memiliki akses untuk melihat secara langsung atas transaksi yang dilakukan oleh pegawai yang berkewenangan.
2. Kesulitan mencari *merchant* atau *merchant* yang terbatas. Terlihat bahwa masih terbatas di wilayah perbatasan sehingga membuat transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) masih sulit untuk dilaksanakan.
3. Belum memahami penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Hal ini terlihat bahwa masih banyaknya pegawai yang berkewenangan yang belum mengerti cara pembukuan dan catatan pajak Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

BNPP RI berencana untuk mendorong pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dengan strategi yang melibatkan dorongan seperti, surat resmi dan perintah resmi untuk melakukannya, serta sosialisasi yang lebih mendalam. Secara keseluruhan, paragraf tersebut menyimpulkan bahwa program Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI belum berjalan efektif dan memerlukan strategi



untuk mendorong pemanfaatannya agar dapat mencapai tujuannya dengan lebih baik.



**Gambar 4.7** Surat Permohonan Pelaksanaan Sosialisasi Kepada BNI di BNPP RI  
(Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, 2023)

#### 4.1.2 Tugas dan Fungsi

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memiliki peran penting dalam mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Berikut adalah tugas-tugas BNPP RI:

- 1. Menetapkan Kebijakan Program Pembangunan Perbatasan:** BNPP RI bertanggung jawab menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan untuk memastikan pengembangan wilayah tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional.
- 2. Menetapkan Rencana Kebutuhan Anggaran:** Salah satu tugas BNPP RI adalah menetapkan rencana kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan perbatasan.
- 3. Mengkoordinasikan Pelaksanaan:** BNPP RI memainkan peran koordinatif dalam melaksanakan program-program di wilayah perbatasan, memastikan sinergi antara berbagai pihak terkait.
- 4. Melaksanakan Evaluasi dan Pengawasan:** BNPP RI terlibat dalam evaluasi dan pengawasan pengelolaan Perbatasan Negara dan Kawasan Perbatasan untuk memastikan kebijakan yang ditetapkan telah patuh dan efektif.

Berikut fungsi Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI):

- Merencanakan dan menetapkan strategi dan langkah-langkah pengembangan Perbatasan Nasional dan Kawasan Perbatasan.
- Mengkoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, sekaligus mengelola Perbatasan Nasional dan Kawasan Perbatasan.
- Mengelola dan memfasilitasi pengukuhan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Nasional.
- Menyusun inventarisasi potensi sumber daya, memberikan rekomendasi penetapan zona pembangunan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan lainnya di Kawasan Perbatasan.
- Menyusun program dan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana transportasi, serta fasilitas lainnya di Kawasan Perbatasan.
- Menyiapkan anggaran pembangunan, dan mengelola Perbatasan Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai skala prioritas.
- Melaksanakan, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Perbatasan Negara dan Kawasan Perbatasan

#### 4.1.3 Visi dan Misi

Visi Badan Nasional Pengelola Perbatasan adalah:

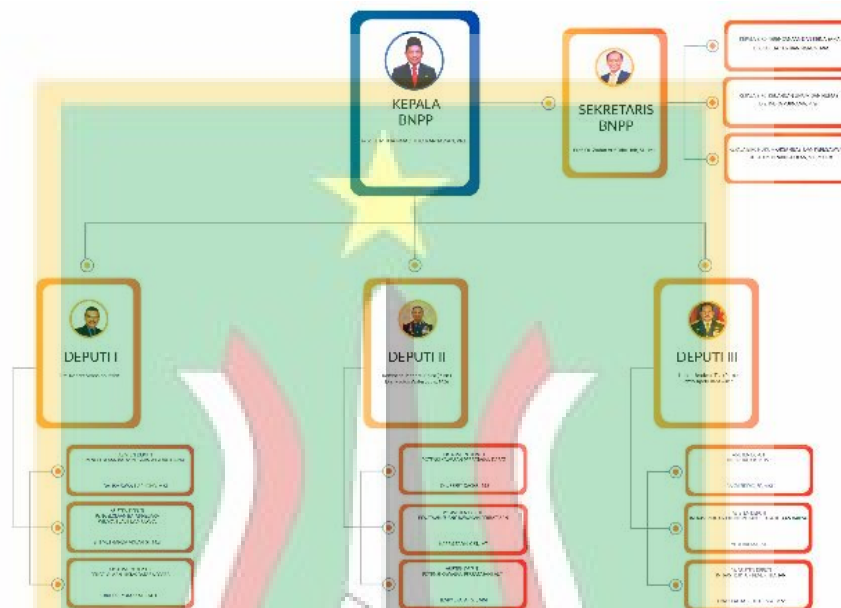
*“Terwujudnya Tata Kelola Perbatasan Negara Yang Efektif Dalam Rangka Perwujudan Kawasan Perbatasan Negara Sebagai Halaman Depan Negara Yang Berdaya-Saing”*

Misi Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai peran strategis untuk mencapai visi melibatkan beberapa aspek utama, seperti:

- Peningkatan efektivitas dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan perbatasan.
- Peningkatan efektivitas dalam merencanakan kebutuhan anggaran untuk pengelolaan perbatasan negara.
- Peningkatan efektivitas dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan perbatasan negara.

- Peningkatan efektivitas dalam melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan perbatasan negara.
- Peningkatan efektivitas dalam mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

#### 4.1.4 Struktur Organisasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)



**Gambar 4.8** Struktur Organisasi BNPP RI

(*bnpp.go.id, 2023*)

Dalam struktur organisasinya, BNPP dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang memiliki kedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kepala Badan BNPP memiliki tanggung jawab utama untuk merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan program, dan memastikan efektivitas pengelolaan perbatasan sesuai dengan mandat Undang-Undang.

- Kepala BNPP RI (Menteri Dalam Negeri)
- Anggota BNPP RI (27 Kementerian/ Lembaga & 13 Provinsi di kawasan Perbatasan). Berikut beberapa anggota Kementerian /Lembaga di BNPP RI, yaitu:

1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

2. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
4. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
5. Kementerian Pertanian Republik Indonesia
6. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
8. Badan Intelijen Negara Republik Indonesia
9. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
10. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Nasional
11. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
12. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
13. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
14. Tentara Nasional Indonesia
15. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
16. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
17. Badan Informasi Geospasial
18. Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
19. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
20. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
21. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
22. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
23. Dan lainnya.

- Sekretariat Tetap BNPP RI
- Sekretaris BNPP RI
- Deputi Bidang Pengelola Batas Wilayah Negara
- Deputi Bidang Pengelola Potensi Kawasan Perbatasan
- Deputi Bidang Pengelola Infrastruktur Kawasan Perbatasan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 4.1.5 Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Perjalanan Dinas

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) merupakan kartu korporat yang digunakan Kementerian/Lembaga untuk transaksi belanja negara, mendukung pembayaran non-tunai. Diperkenalkan pada tahun 2017 oleh Kementerian Keuangan, pembayaran KKP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2019, masing-masing Kementerian dan Lembaga diminta membuat KKP di bank mitra. KKP memiliki dasar hukum dalam PMK No 196/PMK.05/2018 tentang tata cara pembayaran dan penggunaan KKP.

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk biaya perjalanan dinas merupakan bagian dari Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang digunakan khusus untuk biaya-biaya yang berkaitan dengan perjalanan dinas. KKP diperuntukkan bagi perseorangan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, TNI, Polri, dan lain-lain. Perjalanan dinas adalah kegiatan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap untuk kepentingan negara. Persiapannya meliputi biaya makan staf, sewa kendaraan, penginapan, serta pembelian tiket pesawat. Kartu Kredit Pemerintah memudahkan pembayaran biaya-biaya tersebut, menyederhanakan proses administrasi, dan mencatat transaksi terkait perjalanan dinas secara efisien.

Penanggung jawab Kartu Kredit Pemerintah di BNPP RI dalam penggunaan anggaran adalah Kuasa Pengguna Anggaran.<sup>49</sup> Pada dasarnya Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai salah satu bentuk sistem pembayaran non-tunai melalui Uang Persediaan (UP) yang dapat digunakan secara langsung tanpa harus menunggu dana turun dari Kantor Pelayanan Pembayaran Negara (KPPN). Kartu Kredit Pemerintah (KKP) memiliki bentuk seperti kartu biasa dengan memiliki nama pemegang dan identitas K/L pemegang. Berikut besaran Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI:

---

<sup>49</sup> PMK No. 196/PMK.05/2018, 'Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Dengan', 2018.

No.	Pagu DIPA	Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP Tunai dalam 1 (satu) tahun	Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP Kartu Kredit Pemerintah dalam 1 (satu) tahun	Besaran UP Satker per bulan	Perubahan Besaran UP melampaui Besaran UP satker per bulan	Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah atau Perubahan Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah (40%)/Perubahan Proporsi Up Kartu Kredit Pemerintah	
						Kartu Kredit Pemerintah	KKP Domestik
1	248,508,954,000.00	118,163,125,800.00	78,775,417,200.00	2,500,000,000.00	-2,000,000,000.00	900,000,000.00	100,000,000.00

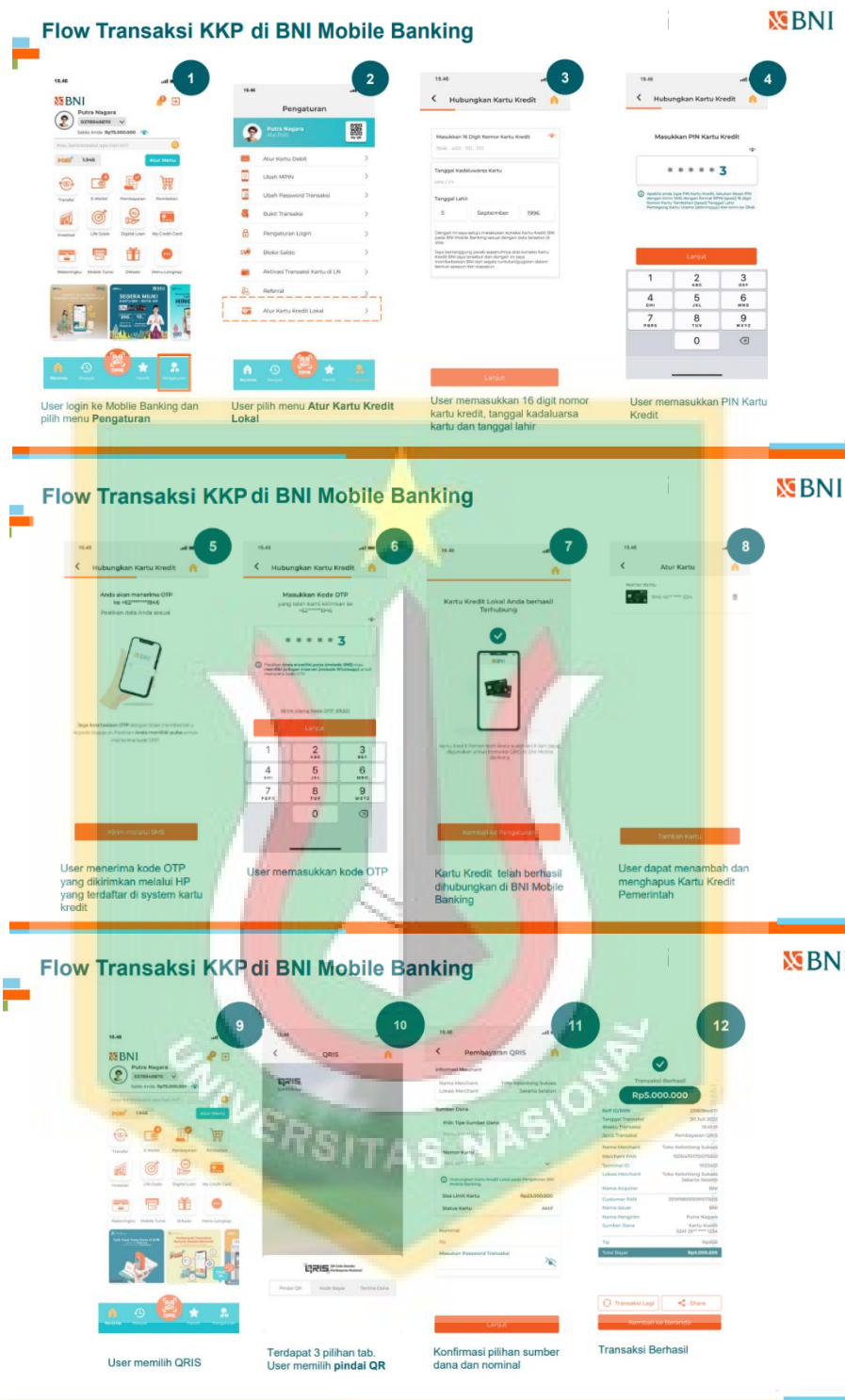
**Gambar 4.9** Besaran Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah 2023

(Surat Persetujuan Besaran UP KKP, S-180/KPN.1204/2023, BNPP RI 2023)

Diketahui bahwa Pagu Jenis Belanja yang dimiliki BNPP RI selama 1 (satu) tahun di tahun 2023 adalah Rp.78.775.417.200,- (*tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah*). Kemudian, penerbitan pertama dilakukan pada tahun 2019 dengan limit Rp.950.000.000,- (*Sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) untuk perjalanan dinas yang dapat dilihat pada Tabel 1.2, dimana tahun tersebut semua K/L Pusat diwajibkan untuk menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), kemudian baru saja ditutup pada tahun 2023 yang alasannya dapat dilihat melalui BAB I. Kemudian, melakukan penerbitan kembali di tahun 2023 dengan batas limit Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) yang dibagi Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) untuk Kartu Kredit Pemerintah (KKP) kegiatan operasional dan Rp.700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) untuk perjalanan dinas. Limit Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dapat terus di revolving selama Pagu Jenis Belanja masih tersedia.

Kemudian, limit Kartu Kredit Pemerintah Perjalanan Dinas dalam bulan pertama memiliki batas limit. Hal tersebut tertera dalam Pasal 29 (2), terkait Batasan belanja Kartu Kredit Pemerintah yang dimana berisi bahwa Kartu Kredit Pemerintah Perjalanan Dinas memiliki batasan limit untuk kali pertama pemakaian paling banyak sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) selama 1 (satu) bulan. Penggunaan KKP dapat dilakukan selain menggunakan mesin EDC, berikut mekanisme cara penggunaan KKP melalui *m-banking*:





**Gambar 4.10** Transaksi KKP Menggunakan M-Banking  
*(Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, 2023)*

Berikut penjelasan transaksi penggunaan KKP dengan menggunakan *m-banking*:

1. User Login ke *m-banking* dan pilih menu pengaturan
2. User pilih menu atur Kartu Kredit Pemerintah local
3. User masukan 16 (enam belas) digit nomor Kartu Kredit, tanggal kadaluwarsa kartu, dan tanggal lahir
4. User masukan PIN kartu kredit pemerintah
5. User akan menerima kode OTP yang dikirimkan melalui Handphone yang terdaftar melalui sistem
6. User memasukan kode OTP
7. Setelah KKP berhasil terhubung ke *m-banking*, user dapat menambahkan dan menghapus KKP
8. Kemudian user dapat juga menggunakan qris dalam *m-banking* tersebut.
9. Setelah melakukan pemindaian, user akan mendapatkan sumber dana dan nominal untuk melakukan konfirmasi bahwa user telah benar melakukan transaksi
10. Setelah melewati tahap-tahap tersebut maka transaksi dapat berhasil dengan mengeluarkan bukti transaksi.

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Evaluasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

Pada bab ini, penulis akan memaparkan rumusan masalah penelitian yang sebagaimana telah tercantum pada BAB I, dengan hal tersebut maka akan dapat menjawab pertanyaan yang telah ada. Agar terjawabnya pertanyaan tersebut maka peneliti akan memaparkan persoalan melalui teori Dunn dalam Sugito dan Joko Triyono. Teori tersebut memiliki 6 (enam) dimensi yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.<sup>50</sup>

Agar diketahuinya pembahasan dalam penelitian ini, yaitu evaluasi dari pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk mendukung penerapan non-tunai di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI). Maka, penulis melakukan pencarian informasi terkait dengan pemanfaatan Kartu

<sup>50</sup> William n Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, ed. by Muhadjir Darwin, 2nd edn (Gadjah Mada University Press).

Kredit Pemerintah (KKP) di Badan Nasional Pengelola Perbatasan berdasarkan pada PMK 196 tahun 2018. Penulis juga menemukan terdapat 5 (lima) aspek pembayaran non-tunai, yaitu universal, konektivitas internet, keamanan, penyimpanan, dan praktis.

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) merupakan sistem pembayaran yang berbentuk kartu dengan tujuan memaksimalkan pemanfaatan non-tunai di pemerintahan. Non-tunai atau *cashless* diinisiasikan sejak tahun 2017 yang melewati 4 (empat) tahapan, hingga tahapan terakhir di tahun 2019, dimana seluruh satker Pusat diwajibkan dalam menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di setiap kegiatannya. Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dilakukan dengan cara menggesekan kartu ke mesin EDC yang ada. Berikut contoh gambar mesin EDC:



**Gambar 4.11** Bentuk Mesin Electronic Data Capture (EDC)

(website [bni.co.id](http://bni.co.id), 2023)

Mesin EDC merupakan alat penerima pembayaran pengguna kartu kredit dan juga sebagai alat pencatat informasi transaksi secara otomatis. Sehingga, transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dapat tercatat secara otomatis. Mesin ini digunakan untuk transaksi non-tunai melalui pembayaran kartu dan akan langsung tercatat tanpa bisa direkayasa. Berikut dimensi evaluasi Dunn dalam Sugito dan Joko Triyono<sup>51</sup>.

#### **4.2.1.1 Efektivitas**

Pada bagian ini penulis akan menguraikan sejauh mana efektivitas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) non-tunai dalam mencapai tujuan

<sup>51</sup> William n Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, ed. by Muhadjir Darwin, 2nd edn (Gadjah Mada University Press).

yang telah ditetapkan. Efektivitas yang dimaksud mencakup kemampuan program untuk mencapai hasil yang diinginkan, pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dan pelaksanaan tindakan yang tepat.

Hasil pada dimensi ini menentukan sudah terlaksana atau belumnya program Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI. Berdasarkan pada hal tersebut, penulis melakukan wawancara agar mengetahui bagaimana pelaksanaan dari program Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam mendukung kebijakan non-tunai di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. Agar mendapatkan informasi yang jelas maka penulis melakukan wawancara kepada Kepala Bagian Keuangan di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia yaitu Ibu Herlina yang mewakilkan Bapak Indra Purnama selaku Kepala Biro Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di BNPP RI terkait efektivitas Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI). Beliau mengatakan bahwa:

“Kalau berbicara efektif atau tidaknya mungkin bisa berbicara melalui Pemegang KKP, tetapi dilihat dari belumnya terlaksana KKP di BNPP RI maka dapat disimpulkan bahwa saat ini KKP belum berjalan secara efektif”<sup>52</sup>

Selanjutnya berdasarkan informasi dari Bapak Asep Hendrawan selaku Bendahara Pengeluaran terkait efektivitas KKP. Beliau mengatakan bahwa:

“KKP kan khusus untuk pembayaran non-tunai, selain non-tunai ada juga tunai. Jadi untuk proporsinya 40% untuk KKP dan 60% untuk Tunai. Kalau dilihat dari efektif atau tidaknya tergantung pada user, apabila dipakai maka efektif tetapi kalau tidak dipakai maka tidak efektif.”<sup>53</sup>

Dari informasi tersebut dapat dikatakan bahwa, penilaian tentang seberapa efektif pemanfaatannya dalam konteks realitas di lapangan, khususnya di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), menunjukkan bahwa kartu ini belum dioperasikan secara maksimal. Hal ini bisa diinterpretasikan bahwa, meskipun ada potensi yang signifikan untuk memberikan kemudahan dalam

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ibu Herlina, Kepala Bagian Biro Keuangan mewakilkan Bapak Indra selaku Kepala Biro Keuangan, Pejabat Pemegang Kewenangan (PPK), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 12 Januari 2023.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Hendrawan, sebagai administrator dan Bendahara Pengeluaran (BP), 12 Januari 2023.

transaksi keuangan pemerintah melalui pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), BNPP RI belum berhasil menerapkan program ini. Terdapat berbagai kendala yang mungkin berkontribusi terhadap situasi ini, termasuk masalah dalam komunikasi, keterbatasan teknologi seperti EDC merchant, atau keengganan dari pelaksana di lapangan. Hasilnya, meskipun Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengeluaran pemerintah, hingga saat ini, implementasinya di BNPP RI belum tercapai dengan maksimal, yang mungkin mengindikasikan perlunya evaluasi dan perbaikan strategi pelaksanaannya.

Terkait dengan masih belumnya pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) perjalanan dinas di lapangan, diungkapkan oleh pegawai yang memiliki kewenangan dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), yaitu Ibu Hanesti memberikan informasi. Beliau mengatakan bahwa:

“Tidak pernah digunakan. Selain tidak didorong oleh atasan, kurangnya sosialisasi tentang tata cara pembukuan baik bunga dan pembayaran pajak dari penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tersebut.”<sup>54</sup>

Ibu Maslinda selaku pengguna Kartu Kredit Pemerintah juga mengatakan bahwa:

“...faktor yang menyebabkan kartu kredit pemerintah belum banyak digunakan. Pertama, masih ada beberapa kendala teknis dalam implementasi kartu kredit pemerintah. Contohnya, belum semua merchant yang menerima pembayaran dengan kartu kredit pemerintah. Di beberapa daerah terpencil, infrastruktur pembayaran elektronik masih belum memadai, sehingga penggunaan kartu kredit pemerintah menjadi terhambat.”<sup>55</sup>

Lebih lanjut, pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP), yaitu Ibu Rizka Kurniati yang juga memberikan informasi. Beliau mengatakan bahwa:

“Tidak ada dorongan atau kewajiban dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)...”<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ibu Hanesti, Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Keuangan, Umum, dan Humas dan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 08 Januari 2024.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ibu Maslinda, Pemegang Kartu Kredit Pemerintah di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), 22 Februari 2024.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ibu Rizka Kurniati, Bendahara Pengeluaran Pembantu Asdep Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 05 Januari 2024.

Pada informasi tersebut, dikatakan bahwa pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah ini selain tidak didorong oleh atasan akan tetapi juga kurangnya sosialisasi dan pemahaman pihak yang memiliki kewenangan untuk memegang Kartu Kredit Pemerintah. Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Dedy selaku pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang diwakilkan oleh Ibu Shaza Sekar juga mengatakan bahwa:

“Belum ada dorongan atau kewajiban dari BNPP RI karena KKP untuk di BNPP belum digunakan.”<sup>57</sup>

Informasi di atas dapat memberikan kesimpulan bahwa para pegawai yang berkewenangan memegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tidak Didorong oleh atasan atau pihak yang berwenang secara resmi. Ini bisa menjadi sebuah masalah jika pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebenarnya dapat memberikan manfaat atau efisiensi dalam proses keuangan atau pembukuan. Kurangnya Sosialisasi menyoroti kurangnya sosialisasi atau penyuluhan mengenai tata cara pembukuan yang benar terkait dengan bunga dan pembayaran pajak dari pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

“Kalau dari informasi yang saya dapatkan dari teman-teman, ada penurunan dalam penggunaan KKP. Menurut saya, hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dan pemahaman yang memadai terkait dengan penggunaan KKP di BNPP RI. Selain itu, juga terdapat kendala teknis seperti kurangnya mesin EDC yang menyulitkan proses transaksi dengan KKP.”<sup>58</sup>

Dalam wawancara dengan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) menyampaikan bahwa terjadi penurunan dalam penggunaan KKP di lembaga tersebut. Analisis awal menunjukkan bahwa faktor utama penyebab penurunan tersebut adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman yang memadai terkait dengan penggunaan KKP di BNPP RI. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun KKP telah tersedia sebagai alat pembayaran, namun masih terdapat hambatan dalam memahami potensi dan manfaat yang dapat diberikan oleh KKP. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ibu Shaza Sekar mewakili Bapak Dedy selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Asdep Infrastruktur Pemerintahan dan pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 22 Januari 2024.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Ibu Risma Widi Utami selaku Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 23 Februari 2023.



tentang penggunaan KKP mungkin menjadi penyebab utama dari kurangnya pemahaman ini. Selain itu, pengguna juga menyoroti kendala teknis seperti kurangnya mesin EDC yang menyulitkan proses transaksi dengan KKP. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur teknis yang kurang memadai juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas penggunaan KKP di BNPP RI. Dalam analisis ini, penting untuk mengidentifikasi kedua faktor tersebut sebagai area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas penggunaan KKP di lembaga tersebut.

Selanjutnya berdasarkan pada tidak adanya dorongan pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI, diungkapkan oleh Bendahara Pengeluaran bentuk dorongan yang selama ini dilakukan, yaitu Bapak Asep Hendrawan memberikan informasi. Beliau mengatakan bahwa:

“Sementara ini baru lisan, karena kami memang tadinya memang belum mau melaksanakan...”<sup>59</sup>

Dari informasi tersebut, bahwa selama ini dorongan untuk pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah hanya melalui lisan tetapi sebelumnya memang tidak ingin dilaksanakan. Berikut alasan dibentuknya Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI. Hasil informasi didapatkan melalui Kepala Bagian Keuangan di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia yaitu Ibu Herlina yang mewakilkan Bapak Indra Purnama selaku Kepala Biro Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di BNPP RI. Beliau mengatakan bahwa:

“Sebenarnya karena ada dorongan moral dari kami, karena sosialisasi yang terus menerus dan adanya PMK terkait Kartu Kredit Pemerintah (KKP) mangkanya kami memutuskan untuk membuat Kartu Kredit Pemerintah (KKP).”

Lebih lanjut, Bendahara Pengeluaran, yaitu Bapak Asep Hendrawan yang juga memberikan informasi. Beliau mengatakan bahwa:

“Alasan dibuatnya Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sih karena adanya dorongan dari PMK. Sehingga kami merasa perlu dibuatnya Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tersebut. Selain itu juga alasan tidak dipakainya karena saat itu covid dan membuat pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan lancar, terus WFH juga. Sehingga Kartu Kredit Pemerintah (KKP) belum terlaksana, itupun setelah covid para pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebelumnya banyak yang sudah pindah, jadi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tersebut tidak

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Hendrawan, sebagai administrator dan Bendahara Pengeluaran (BP), 12 Januari 2023.

terlaksana. Hanya saja kami baru mengganti dan menutupnya di tahun 2023.”<sup>60</sup>

Informasi di atas bermaksud bahwa di tahun 2019, BNPP RI memang berniat tidak menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terlebih dahulu hal tersebut dikarenakan adanya dorongan karena adanya peraturan yang dibentuk untuk menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) serta moral untuk segera melakukan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Akan tetapi karena pandemic covid-19 yang saat itu sedang meningkat dan pemerintah memberikan perintah untuk melakukan *Work From Home* (WFH) sehingga membuat kegiatan yang dilakukan menjadi tidak lancar dan setelah pandemic banyak pegawai yang berkewenangan memegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang telah dipindahkan atau pindah. Sehingga, diputuskan untuk tidak menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sementara. Berdasarkan pada wawancara dengan Ibu Risma selaku pemegang KKP di BNPP RI, beliau mengatakan:

“Menurut saya, penggunaan KKP di BNPP RI belum efektif. Kami belum melihat adanya langkah-langkah konkret yang diambil untuk meningkatkan efektivitas penggunaan KKP. Saya rasa perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif dan juga perbaikan dalam infrastruktur teknis seperti penambahan mesin EDC.”<sup>61</sup>

Dalam paragraf tersebut, Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) menyampaikan pandangannya terkait kurangnya efektivitas penggunaan KKP di lembaga tersebut. Analisis awal menunjukkan bahwa ada perasaan ketidakpuasan terhadap langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan penggunaan KKP di BNPP RI. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KKP telah diperkenalkan sebagai alat pembayaran, namun belum ada tindakan konkret yang diambil oleh pihak terkait untuk memastikan pemanfaatannya yang efektif. Pengguna KKP menyoroti kebutuhan akan sosialisasi yang lebih intensif sebagai salah satu langkah penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan manfaat KKP di BNPP RI. Selain itu, pengguna juga mengidentifikasi perlunya perbaikan dalam infrastruktur teknis seperti penambahan mesin EDC. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur

---

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Ibu Risma Widi Utami selaku Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 23 Februari 2023.

yang kurang memadai menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas penggunaan KKP di BNPP RI.

Agar Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dapat terealisasi secara maksimal maka di tahun selanjutnya diperlukannya strategi dalam mendorong pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI, Bapak Asep Hendrawan selaku Bendahara Pengeluaran memberikan informasi. Beliau mengatakan:

“Strategi dalam meningkatkan efektivitas Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sih paling kita akan mendorong pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) kedepannya agar lebih aktif dalam pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) baik itu melalui dorongan lisan, tulisan, ataupun sosialisasi yang nanti akan dilakukan.”<sup>62</sup>

“Harus nanti. Kemungkinan besar kami lembaga keuangan atas nama KPA akan mengundang dari BNI dan lainnya untuk sosialisasi ulang terkait dengan implementasi KKP ini. Manfaatnya apa, yang lain lain istilahnya cara transaksi dan yang lain lainnya. Sampaikan ke teknis cara penggunaannya mungkin harus harus kami harus sosialisasi lagi, karena untuk tahun ini harus diimplementasikan.”<sup>63</sup>

Berdasarkan pada informasi tersebut dikatakan bahwa strategi agar dapat mendorong pemanfaatan Kartu kredit Pemerintah diperlukannya dorongan lisa, tulisan, dan sosialisasi, sehingga untuk kedepannya bagian keuangan yang mewakili KPA akan mengundang BNI sebagai narasumber untuk memberikan sosialisasi kembali untuk implementasi Kartu Kredit Kedepannya. Beliau juga mengatakan bahwa:

“...Harusnya memberi bentuk nota dinas dari KPA, nah selama ini belum. Tapi mungkin untuk ke tahun 2024 ini kita akan coba ber-nota dinas kepada aparat PPK, pejabat BPP, pejabat pengadaan dan PPTK untuk mengoptimalkan pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) itu mungkin akan seperti itu.”<sup>64</sup>

Sehingga dari informasi di atas, bahwa fokus utama dalam mendorong pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah memotivasi para staf yang berkewenangan memegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) agar digunakan secara aktif dalam kegiatannya. Strategi ini melibatkan dorongan lisan, tertulis, dan kegiatan sosialisasi. Dorongan lisan kemungkinan melibatkan komunikasi langsung

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Hendrawan, sebagai administrator dan Bendahara Pengeluaran (BP), 12 Januari 2023.

<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> Ibid.

antar individu, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan membentuk sikap proaktif dalam pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Tertulis dapat berbentuk nota dinas atau surat resmi lainnya. Sosialisasi, dalam hal ini dilakukan guna meningkatkan pengetahuan pegawai yang berkewenangan memegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan seluruh pegawai BNPP RI terkait pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Secara keseluruhan, strategi ini mengakui pentingnya keterlibatan aktif para pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam memberikan sosialisasi dan dorongan mengoptimalkan efektivitas Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan pada eksplorasi yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa pada dimensi efektivitas William N Dunn dalam Sugito bahwa suatu program dapat dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>65</sup> Hal tersebut juga diperkuat dalam Etzioni dalam Simamora bahwa dengan adanya sebuah tingkat keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan yang didasarkan kepada syarat yang ditentukan maka hal tersebut dapat dikatakan sebuah efektivitas.<sup>66</sup> Sehingga efektivitas dalam evaluasi pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) tidak berjalan secara efektif. Hal tersebut didasari karena belum diterapkannya program Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI, sehingga belum tercapainya kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan dan mencapai tujuan.

Dalam konteks pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI, strategi yang diterapkan dapat dikaitkan dengan evaluasi formatif. Fokus utama dari strategi ini adalah untuk memotivasi para staf yang memiliki Kartu Kredit Pemerintah (KKP) agar aktif menggunakan kartu tersebut dalam kegiatan operasional mereka. Dorongan ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk komunikasi lisan, komunikasi tertulis, dan kegiatan sosialisasi. Dorongan lisan dapat berupa komunikasi langsung antar individu, seperti pembicaraan antara atasan dan bawahan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan membentuk sikap proaktif dalam pemanfaatan KKP. Komunikasi tertulis dapat berbentuk nota

---

<sup>65</sup> William n Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, ed. by Muhadjir Darwin, 2nd edn (Gadjah Mada University Press).

<sup>66</sup> Simamora. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT Alex Media Komputindo.

dinas atau surat resmi lainnya yang memberikan arahan atau dorongan kepada para pegawai untuk memanfaatkan KKP dengan optimal.

Meskipun Kartu Kredit Pemerintah (KKP) memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengeluaran pemerintah, implementasinya masih terhambat. Beberapa kendala mungkin menjadi penyebabnya, yaitu keterbatasan teknologi seperti EDC, kurangnya dorongan untuk menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan kurangnya sosialisasi atau penyuluhan agar memberikan pengetahuan kepada pegawai yang berkewenangan untuk memegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI.

#### 4.2.1.2 Efisiensi

Efisiensi berhubungan besarnya upaya yang dilakukan untuk mencapai hasil yang ingin dicapai. Dapat dikatakan bahwa, efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk dapat menghasilkan sebuah efektivitas secara maksimal. Berdasarkan pada hal tersebut, dimensi efisiensi yang dimaksudkan pada penulisan ini adalah seberapa efisien pemanfaatan kartu kredit dalam melakukan transaksi keuangan pemerintah.

Pada dimensi efisiensi akan mempertimbangkan apakah kartu kredit telah mengurangi biaya administratif atau biaya transaksi dan mempercepat proses transaksi. Ini mungkin melibatkan perbandingan biaya transaksi dengan manfaat yang diperoleh. Agar mengetahui lebih jelas, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia yaitu Ibu Herlina yang mewakilkan Bapak Indra Purnama selaku Kepala Biro Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di BNPP RI. Beliau mengatakan bahwa:

“Tentunya pemakaian KKP ini sangat efisien, dilihat tidak perlunya menunggu pencairan dana dari KPPN membuat kinerja atau kegiatan dapat dengan cepat terlaksana.”<sup>67</sup>

Informasi di atas bermaksud bahwa penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam pengelolaan anggaran pemerintah merupakan langkah yang sangat efisien. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa tidak perlu menunggu pencairan dana

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ibu Shaza Sekar mewakilkan Bapak Dedy selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Asdep Infrastruktur Pemerintahan dan pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 22 Januari 2024.



dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Kantor Pelayanan Pembayaran Negara (KPPN)) yang seringkali memakan waktu. Dengan adanya Kartu Kredit Pemerintah (KKP), kegiatan dan program pemerintah dapat terlaksana dengan cepat karena tidak terkendala oleh proses pencairan dana yang lambat. Hal tersebut diperkuat dengan informasi yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran, yaitu Bapak Asep Hendrawan. Beliau mengatakan bahwa:

“Pemakaian sih tentunya menjadi lebih cepat akan tetapi tetap mengacu pada pengadaan barang dan jasa. Kalau untuk Kartu Kredit Pemerintah (KKP) perjalanan dinas kan tidak dibatasi pembayarannya asalkan tidak melebihi limit yang ditentukan...”<sup>68</sup>

Kalimat tersebut menjelaskan bahwa meskipun pemakaian dana dapat dilakukan dengan lebih cepat, walaupun transaksi menjadi lebih cepat apabila pengadaan barang dan jasa tidak menerima transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) maka tidak menjadi efisien. Pembayaran tidak memiliki batasan tertentu selama tidak melebihi limit yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP), yaitu Ibu Rizka Kurniati yang juga memberikan informasi. Beliau mengatakan bahwa:

“Ya, pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Perjalanan Dinas dapat membawa perubahan dalam kecepatan proses transaksi. Dengan adanya Kartu Kredit Pemerintah (KKP), transaksi pembayaran untuk keperluan perjalanan dinas dapat dilakukan secara elektronik dan lebih efisien. Kartu Kredit Pemerintah (KKP) memungkinkan pembayaran dilakukan secara elektronik, yang dapat mempercepat proses transaksi pembelian...”<sup>69</sup>

Lebih lanjut, Bapak Dedy selaku pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang diwakilkan oleh Ibu Shaza Sekar menyatakan bahwa:

“Setiap transaksi menggunakan KKP akan terekam secara digital, memudahkan pelacakan dan audit transaksi, meningkatkan transparansi, serta meminimalisir risiko kecurangan.”<sup>70</sup>

Pernyataan dalam hasil wawancara menyoroti manfaat signifikan dari penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Perjalanan Dinas dalam konteks

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Hendrawan, sebagai administrator dan Bendahara Pengeluaran (BP), 12 Januari 2023.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu Rizka Kurniati, Bendahara Pengeluaran Pembantu Asdep Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 05 Januari 2024.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ibu Shaza Sekar mewakili Bapak Dedy selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Asdep Infrastruktur Pemerintahan dan pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 22 Januari 2024.



efisiensi dan percepatan proses transaksi. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) memungkinkan transaksi pembayaran untuk keperluan perjalanan dinas dilakukan secara elektronik yang membawa perubahan positif dengan menghemat waktu dan sumber daya yang sebelumnya diperlukan untuk mengurus pembayaran perjalanan dinas.

Setelah pernyataan di atas bahwa dengan memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dapat mempercepat transaksi tanpa perlu menunggu pencairan dana dari Kantor Pelayanan Pembayaran Negara (KPPN), maka diperjelas kembali oleh Bapak Asep Hendrawan selaku Bendahara Pengeluaran. Beliau mengatakan bahwa:

“Tidak, karena Kartu Kredit Pemerintah (KKP) kan sudah melekat ke pribadi yang sudah didaftarkan di awal, jadi penggunaannya terserah yang memakai. Paling nanti saat adanya *billing* yang masuk ke bendahara nanti saya sebagai BP akan mengkonfirmasi ke pengelola kegiatan untuk melengkapi SPP dan dokumen lainnya untuk melakukan revolving ke Kantor Pelayanan Pembayaran Negara (KPPN).”<sup>71</sup>

Beliau juga mengatakan:

“Iya, semua *billing* dan *e-billing* di kirim ke saya....”<sup>72</sup>

Informasi di atas menyimpulkan bahwa penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dapat digunakan secara langsung oleh Pegawai yang berkewenangan dalam menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tanpa perlu adanya konfirmasi dari Bendahara Pengeluaran. Akan tetapi, nanti Bendahara Pengeluaran akan mengawasi melalui *billing* yang dikirimkan oleh BNI setiap bulannya secara rutin. Sehingga, Pegawai yang berkewenangan dalam menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) harus bertanggung jawab dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) karena akan di pertanggungjawabkan setiap bulannya.

Terkait pelaporan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) diperjelas oleh Bapak Asep Hendrawan selaku Bendahara Pengeluaran. Beliau mengatakan bahwa:

“...pelaporannya biasanya sebulan sekali setelah *billing* diterbitkan. Kalau untuk kecepatan laporan sama aja soalnya nanti akan masuk ke LPJ berbarengan pada transaksi lainnya, yaitu Uang Persediaan (UP) Tunai, Ls, dan TUP apabila ada. Jadi kalau nanti Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pasti akan dilaporkan setiap bulannya berbarengan

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Hendrawan, sebagai administrator dan Bendahara Pengeluaran (BP), 12 Januari 2023.

<sup>72</sup> Ibid.

dengan Uang Persediaan (UP) Tunai karena termasuk ke Uang Persediaan (UP).<sup>73</sup>

Informasi di atas menerangkan bahwa dalam kecepatan pelaporan ini tidak berbeda dengan transaksi lainnya seperti Uang Persediaan (UP) Tunai, Ls, dan TUP jika ada. Oleh karena itu, Kartu Kredit Pemerintah (KKP) akan dilaporkan setiap bulannya bersama dengan Uang Persediaan (UP) Tunai karena termasuk dalam transaksi Uang Persediaan (UP) tersebut.

Kemudian, dalam efisiensi biaya dalam pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) diperjelas oleh Pihak Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah (KKP) BNPP RI, yaitu Bapak Dedy selaku pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang diwakilkan oleh Ibu Shaza Sekar. Beliau mengatakan:

“Untuk Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ini tidak ada pungutan biaya, hanya ada biaya materai hanya untuk 1 (satu) satker yang nanti akan dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pembayaran Negara (KPPN).<sup>74</sup>

Beliau juga mengatakan:

“Tidak adanya bunga, karena sesuai pada PMK 196/2018 tidak dibebankannya bunga untuk Kartu Kredit Pemerintah (KKP).<sup>75</sup>

Pernyataan dari informasi tersebut disimpulkan bahwa pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tidak dipungut biaya apapun oleh BNI hal tersebut karena bentuk kepatuhan BNI pada Peraturan, sehingga BNI hanya membebankan biaya materai yang nantinya juga akan langsung dibebankan kepada Kartu Kredit Pemerintah (KKP) secara langsung.

Berdasarkan eksplorasi yang dilakukan penulis, bahwa dimensi efisiensi menurut William N Dunn dalam Sugito bahwa suatu program dapat dikatakan efisien apabila usaha yang dilakukan sepadan dengan hasil yang dicapai.<sup>76</sup> Hal tersebut juga dikatakan oleh Mahmudi bahwa efisiensi sebagai sebuah proses yang ditempuh untuk membandingkan dan mengukur masukan beserta keluaran, atau

---

<sup>73</sup> Ibid.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu Shaza Sekar mewakili Bapak Dedy selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Asdep Infrastruktur Pemerintahan dan pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 22 Januari 2024.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Ibu Shaza Sekar mewakili Bapak Dedy selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Asdep Infrastruktur Pemerintahan dan pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 22 Januari 2024.

<sup>76</sup> William n Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, ed. by Muhadjir Darwin, 2nd edn (Gadjah Mada University Press).

output.<sup>77</sup> pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dapat berjalan secara efisien apabila diterapkan. Hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dapat dikatakan bahwa program Kartu Kredit Pemerintah (KKP) memberikan efisiensi pada transaksi keuangan negara karena memberikan percepatan pelaksanaan kegiatan dan terbebasnya dari biaya-biaya pungutan transaksi.

Lalu, dalam hal efisiensi kecepatan pencairan dana dan biaya administrasi sudah baik. Karena dengan kecepatan pencairan dana dapat membuat pelaksanaan kegiatan menjadi lebih cepat juga dan terbebasnya biaya bunga membuat Kartu Kredit Pemerintah (KKP) menjadi lebih unggul daripada transaksi lainnya karena tidak adanya pungutan yang dilakukan oleh Bank Penerbit. Akan tetapi, Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI saat ini belum terlaksana sehingga Kartu Kredit Pemerintah (KKP) belum memberikan manfaat di BNPP RI, sehingga diharapkan BNPP RI juga dapat menerapkan Kartu Kredit Pemerintah ini.

Biaya Bunga	Besaran
<i>Request New Card</i>	0%
<i>Credit Limit Adjustment</i>	-
<i>Payment via Branches</i>	-
<i>Overlimit Fee</i>	-
<i>Annual Fee</i>	-
<i>Late Charges</i>	-
<i>Direct Debit Payment</i>	-
Biaya Ganti Kartu Hilang	-
Biaya Ganti Kartu Sebab Lain	-
Biaya Copy Sales Draft	-
Biaya Copy Lembar Tagihan	-
Biaya Copy Lembar Direct Debit	-
Pembayaran Melalui ATM	-

**Tabel 4.1** Besaran Pungutan Biaya dan Bunga Kartu Kredit Pemerintah BNI

(website *bni.co.id*, 2023)

<sup>77</sup> Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua, UPP. STIM. YKPN, Yogyakarta

Dari segi evaluasi formatif, dapat dilihat bahwa pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tidak membebankan biaya apapun oleh BNI, kecuali biaya materai yang langsung dibebankan kepada KKP. Hal ini menunjukkan adanya kepatuhan BNI pada peraturan yang mengatur penggunaan KKP, yang secara langsung mendukung efektivitas penggunaan KKP dalam hal biaya administrasi. Namun, meskipun biaya administrasi telah diatasi dengan baik, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan KKP di BNPP RI. Efisiensi kecepatan pencairan dana dan biaya administrasi memang telah tercapai dengan baik, namun KKP di BNPP RI belum terlaksana dengan baik, sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan secara langsung oleh BNPP RI. Dengan demikian, evaluasi formatif menyoroti bahwa meskipun ada upaya dalam mengatasi biaya administrasi dan meningkatkan efisiensi, masih ada tantangan yang perlu diatasi dalam pelaksanaan program KKP di BNPP RI agar dapat berjalan secara efisien.

Dalam konteks evaluasi sumatif, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam efisiensi kecepatan pencairan dana dan biaya administrasi, namun dampak perubahan yang diharapkan dalam transaksi belum dapat dirasakan secara signifikan oleh BNPP RI. Oleh karena itu, evaluasi sumatif menunjukkan bahwa pada saat ini, program KKP di BNPP RI belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Dengan demikian, perlu adanya langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan pelaksanaan program KKP agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam efisiensi transaksi di BNPP RI.

#### **4.2.1.3 Kecukupan**

Kecukupan berkaitan dengan sejauh mana program yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan. Dalam evaluasi pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), kecukupan mencerminkan sejauh mana non-tunai kartu kredit dapat digunakan untuk berbagai jenis pembayaran yang diperlukan oleh pemerintah, seperti pembelian barang dan jasa, atau dana perjalanan.

Agar memperjelas dimensi kecukupan pada bagian ini, maka penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia yaitu Ibu Herlina yang mewakili

Bapak Indra Purnama selaku Kepala Biro Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di BNPP RI bahwa:

“Untuk Kartu Kredit Pemerintah (KKP) kami memakai Visa Platinum”<sup>78</sup>

Beliau juga mengatakan bahwa:

“Terkait itu, kami hanya menerima dari BNI, kemungkinan karena pemanfaatannya yang lebih luas dibandingkan Gold.”<sup>79</sup>

Hal tersebut menjelaskan bahwa BNPP RI menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Visa Platinum, karena benefit yang dimiliki oleh jenis Platinum lebih luas dibandingkan dengan jenis Gold. Bapak Asep Hendrawan selaku Bendahara Pengeluaran (BP) juga mengatakan bahwa:

“Iya, seluruhnya memakai platinum. Sebetulnya itu dikasih sendiri sama Bank, karena kalau untuk Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ini masuknya corporate card pemegang sebagai kartu kredit perusahaan.”<sup>80</sup>

Agar mengetahui lebih jelas Bapak Deny selaku Divisi Card Business – Unit Corporate Card Product Development Bank Negara Indonesia (BNI). Beliau mengatakan bahwa:

“Alasan digunakannya Kartu Kredit Pemerintah (KKP), pemanfaatan visa yang lebih luas dibandingkan GPN karena BNPP RI seringkali melakukan perjalanan dinas di Daerah perbatasan yang berseberangan dengan luar negeri sehingga dibutuhkan pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Visa”<sup>81</sup>

Berdasarkan informasi di atas bahwa alasan penggunaan visa karena dapat mencakup lebih luas yang didasari kepada tugas BNPP RI yang memiliki tugas dan kewajiban di Perbatasan. Beliau juga mengatakan bahwa:

“karena benefit Platinum yang lebih.”<sup>82</sup>

“iya Free Akses Executive Lounge”<sup>83</sup>

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ibu Herlina, Kepala Bagian Biro Keuangan mewakili Bapak Indra selaku Kepala Biro Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 12 Januari 2023.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ibu Herlina, Kepala Bagian Biro Keuangan mewakili Bapak Indra selaku Kepala Biro Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 12 Januari 2023.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Hendrawan, sebagai administrator dan Bendahara Pengeluaran (BP), 12 Januari 2023.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Deny, Divisi Card Bisnis – Unit Corporate Card Product Development Bank Negara Indonesia (BNI), 22 November 2023.

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> Ibid.

Berdasarkan informasi di atas dapat dikatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pemilihan Visa Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dibandingkan kartu yang menggunakan jaringan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Pertama, seringkali BNPP RI melakukan perjalanan dinas ke wilayah perbatasan yang berbatasan dengan luar negeri memerlukan metode pembayaran yang dapat diterima secara internasional. Visa, dengan penerimaan globalnya, menjawab kebutuhan ini dengan lebih efektif dibandingkan GPN yang berorientasi domestik. Faktor ini menggarisbawahi pentingnya kemampuan transaksi internasional dalam operasional pemerintah, terutama dalam konteks yang melibatkan aktivitas lintas batas.

Preferensi terhadap Kartu Kredit Pemerintah (KKP) varian Platinum, yang kemungkinan besar disebabkan oleh peningkatan manfaat yang ditawarkannya. Salah satu keuntungan tersebut, yang disebutkan secara khusus, adalah akses gratis ke *Executive Lounge*. Fasilitas ini penting bagi pejabat pemerintah yang sering bepergian, karena memberikan lingkungan yang lebih nyaman dan kondusif untuk beristirahat atau bekerja selama transit. Akses Executive Lounge adalah fitur umum kartu kredit premium dan sangat berharga dalam mengurangi kelelahan yang terkait dengan perjalanan, karena para Pegawai BNPP RI yang terus melakukan dinas ke wilayah perbatasan, disebabkan tugas dan kewajibannya untuk mengawasi perbatasan. Secara keseluruhan, keputusan untuk memilih Visa Kartu Kredit Pemerintah (KKP), khususnya varian Platinum, tampaknya didorong oleh pertimbangan praktis mengenai kegunaan internasional dan nilai tambah manfaat premi, yang selaras dengan kebutuhan BNPP RI.

Dari informasi dan data yang berada pada Gambar 4.2 yang telah peneliti dapatkan maka dapat dikatakan bahwa, BNPP RI menggunakan Kartu Kredit dengan model Visa. Dimana pada penggunaan kartu ini dapat diterima secara nasional dan internasional atau dapat dikatakan dapat dipakai secara universal. Keputusan ini didorong oleh kebutuhan untuk memiliki metode pembayaran yang universal, terutama saat melakukan perjalanan dinas di daerah perbatasan dan di luar negeri. Di wilayah perbatasan, terutama yang berdekatan dengan negara lain, ketersediaan dan penerimaan sistem pembayaran seringkali menjadi tantangan. Sistem GPN, yang dirancang khusus untuk kebutuhan domestik Indonesia,



mungkin tidak mendapatkan dukungan di negara-negara lain. Disisi lain, Visa dikenal secara global dan diterima di banyak negara, memberikan fleksibilitas dan keamanan dalam transaksi.

Dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) berlogo Visa, pegawai pemerintah dapat melakukan transaksi keuangan dengan lancar selama perjalanan dinas, tanpa khawatir akan keterbatasan atau ketidakcocokan sistem pembayaran. Keputusan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan efisiensi dan kenyamanan dalam operasi keuangannya, terutama dalam situasi yang menuntut mobilitas tinggi dan akses ke jaringan pembayaran internasional. Selain itu, dapat dikatakan juga bahwa Kartu Kredit Pemerintah (KKP) jenis Platinum ataupun Gold tidak mempengaruhi batas limit khusus Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ini. Pada dimensi ini juga dilihat dari peralatan yang mendukung agar tercapainya meminimalisir penggunaan tunai.

"Limit KKP yang ada saat ini masih terlalu rendah untuk memenuhi kebutuhan belanja perjalanan dinas di BNPP RI. Selain itu, kami juga merasa bahwa adanya batas minimal penggunaan KKP dalam belanja masih menghambat efisiensi proses transaksi." <sup>84</sup>

Pernyataan tersebut menggambarkan ketidakpuasan pengguna KKP BNPP RI terhadap ketersediaan limit dan batasan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Pengguna KKP menyatakan bahwa limit yang tersedia saat ini dianggap masih terlalu rendah untuk memenuhi kebutuhan belanja perjalanan dinas di BNPP RI. Hal ini menunjukkan bahwa limit yang disediakan oleh KKP belum sesuai dengan skala atau besarnya anggaran yang diperlukan untuk kegiatan dinas di lembaga tersebut. Sebagai akibatnya, pengguna KKP merasa terbatas dalam melakukan transaksi yang memerlukan anggaran besar, yang pada gilirannya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas.

Adanya batas minimal penggunaan KKP dalam belanja juga dianggap sebagai hambatan dalam efisiensi proses transaksi. Pengguna KKP merasa bahwa batasan ini membatasi fleksibilitas mereka dalam menggunakan KKP untuk melakukan pembayaran, terutama untuk transaksi dengan nilai yang lebih kecil. Hal ini dapat

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ibu Risma Widi Utami selaku Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 23 Februari 2023.

mengakibatkan penggunaan KKP yang tidak optimal dan memerlukan tambahan proses atau langkah transaksional yang tidak efisien.

Diketahui bahwa, BNPP RI melakukan 2 (dua) kali penerbitan. Penerbitan pertama di tahun 2019 yang ditutup pada tahun 2023, kemudian melakukan pembukaan kembali di tahun 2023. Berdasarkan informasi yang diterima oleh peneliti, diketahui BNPP RI memiliki batas anggaran, Bapak Asep Hendrawan sebagai Bendahara Pengeluaran mengatakan bahwa:

“...limit di BNPP ini ada Rp.900.000.000,- (*Sembilan ratus juta rupiah*) dikurangi Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) untuk Kartu Kredit Pemerintah (KKP) operasional, jadi sekitar Rp.700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) untuk perjalanan dinas.”<sup>85</sup>

Kemudian, beliau juga mengatakan bahwa:

“Untuk limit Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang 1 miliar sih sudah mencukupi karena bisa terus di revolving. Untuk limit Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Dinas sebelumnya juga sudah cukup dengan total limit Rp.950.000.000,- (*Sembilan ratus lima puluh juta rupiah*).”<sup>86</sup>

“...karena yang melakukan revolving ke Kantor Pelayanan Pembayaran Negara (KPPN) nanti BP sesuai pada *billing* yang diterbitkan oleh BNI.”<sup>87</sup>

Kemudian, berdasarkan informasi yang didapat peneliti, dari Ibu Rizkia Kurniati selaku pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tahun 2019-2023 mengatakan bahwa:

“...batasan belanja perjalanan dinas dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebesar maksimal Rp 20 juta per Kartu Kredit per bulan”<sup>88</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Hanesti yang juga merupakan pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tahun 2019-2023. Beliau mengatakan bahwa:

“Karna penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terbatas hanya Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*)...”<sup>89</sup>

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Hendrawan, sebagai administrator dan Bendahara Pengeluaran (BP), 12 Januari 2023.

<sup>86</sup> Ibid.

<sup>87</sup> Ibid.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Ibu Rizka Kurniati, Bendahara Pengeluaran Pembantu Asdep Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 05 Januari 2024.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Ibu Hanesti, Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Keuangan, Umum, dan Humas dan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 08 Januari 2024.

Kemudian diperjelas kembali oleh Bapak Asep Hendrawan selaku Bendahara Pengeluaran, bahwasanya:

“...Untuk Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Perjalanan dinas ini memang sesuai dengan regulasinya, pembukaan pertama itu limitnya 20 juta, tapi boleh minta sesuai dengan kebutuhan dengan catatan, saya sebagai bendahara atau PIC kalau ada salah satu BPP perlu limit diatas 20 juta, kita bisa menaikkan limit tersebut. Jadi bisa dinaiki sampai dengan batas limit yang dipunyai oleh BNPP. Pada saat itu yang pembukaan awal tahun 2019 itu limitnya kan masih 1 milyar belum ada kartu domestik, hanya baru ada Kartu Kredit Pemerintah (KKP) barang operasional dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Perjalanan Dinas. Nah untuk barang operasional hanya Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) limitnya, sisanya kan Rp.950.000.000,- (*sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) itu kita bagi ke 20 BPP dengan per orang Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) itukan Rp.400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*), sisanya Rp.550.000.000,- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) itu sebagai cadangan. Sehingga apabila BPP yang memerlukan limitnya untuk dinaikan maka diperlukannya bilang kepada saya sebagai BP meminta sampaikan ke BNI untuk menaikkan limit. Tetapi belum sampai ke situ karena penggunaannya belum pernah terlaksana”<sup>90</sup>

Berdasarkan kepada informasi yang didapatkan bahwasanya pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Perjalanan Dinas dibatasi dengan limit Rp 20 juta per bulan untuk per kartu. Hal tersebut juga didasari oleh PMK 196 Tahun 2018 Pasal 29 ayat (2) bahwa “Batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah (KKP) perjalanan dinas untuk pertama kali diberikan paling banyak Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) untuk setiap Kartu Kredit Pemerintah (KKP) selama 1 (satu) bulan”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hal Ini menunjukkan adanya kebijakan untuk membatasi pengeluaran secara bulanan, yang mungkin bertujuan untuk mencegah pengeluaran berlebihan dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk perjalanan dinas digunakan dengan bijaksana dan efisien.

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Hendrawan, sebagai administrator dan Bendahara Pengeluaran (BP), 12 Januari 2023.

Namun, disisi lain, batasan ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai apakah jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan perjalanan dinas yang sebenarnya, terutama dalam situasi tertentu dimana biaya perjalanan bisa melebihi alokasi anggaran yang ditetapkan.

Sehingga, penting untuk mempertimbangkan biaya perjalanan yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tujuan, durasi, dan sifat perjalanan. Misalnya, perjalanan ke daerah terpencil atau dengan durasi yang lebih lama mungkin memerlukan biaya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kondisi yang beragam. Berdasarkan informasi diatas bahwa untuk bulan selanjutnya Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Perjalanan Dinas dapat memaksimalkan limit sesuai dengan ketersediaan besaran Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP) yang telah ditentukan akan tetapi berdasarkan dengan persetujuan Bendahara Pengeluaran sebagai Administrator Kartu Kredit Pemerintah (KKP), akan tetapi pada Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di tahun 2019 belum tersampainya kenaikan limit karena Kartu Kredit Pemerintah (KKP) belum terlaksana. Lebih lanjut, Ibu Rizkia Kurniati selaku pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) mengatakan:

“Ya, seluruh pembayaran jenis belanja untuk perjalanan dinas dapat dilakukan melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Perjalanan Dinas. Kartu Kredit Pemerintah (KKP) digunakan sebagai alat pembayaran yang mencakup berbagai komponen pembayaran seperti biaya transportasi, penginapan, dan belanja lainnya terkait perjalanan dinas kecuali uang harian dan konsumsi...”<sup>91</sup>

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Hanesti. Beliau mengatakan:

“Tidak. Karena hanya bisa pembayaran untuk tiket pesawat/kereta/travel, sewa kendaraan, dan penginapan saja. Sedangkan uang saku tidak bisa menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).”<sup>92</sup>

“...sehingga dalam 1 perjalanan dinas akan ada 2 tata cara pembayaran, pesawat/travel/kereta menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sementara uang saku menggunakan LS. Ini akan membingungkan dalam pembukuan.”<sup>93</sup>

<sup>91</sup> Wawancara dengan Ibu Rizka Kurniati, Bendahara Pengeluaran Pembantu Asdep Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 05 Januari 2024.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Ibu Hanesti, Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Keuangan, Umum, dan Humas dan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 08 Januari 2024.

<sup>93</sup> Ibid.

Dapat dikatakan bahwa Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tidak mencakup semua jenis biaya perjalanan, seperti uang harian dan konsumsi, yang harus dibayar melalui metode lain. Hal ini menyebabkan perlunya dua metode pembayaran berbeda yaitu melalui Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Langsung (Ls). Ini berpotensi menciptakan kebingungan dan kesulitan dalam pembukuan.

Selain itu, berdasarkan informasi di atas juga bahwa Kartu Kredit Pemerintah (KKP) perjalanan dinas masih memiliki kekurangan karena jenis transaksi yang dapat dibayarkan melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) perjalanan dinas tidak meluas seperti tidak dapat dipergunakan untuk uang harian atau saku, kemudian tidak bisanya dipergunakan untuk sewa transportasi di wilayah perbatasan dan masih jarang peminatan yang mempergunakan mesin EDC atau transaksi non-tunai lainnya. Dengan demikian pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI hanya bisa dimanfaatkan sebagai pembelian tiket pesawat. Agar mengetahui lebih jelas, peneliti juga menanyakan terkait sistem pembayaran yang dilakukan oleh BNPP RI apabila menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Berikut penjelasan dari Bapak Asep Hendrawan selaku Bendahara Pengeluaran. Beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau untuk perjalanan dinas langsung ke vendor, seperti ke Garuda langsung atau ke maskapai penerbangan langsung bayar atau juga bisa melalui traveloka atau website pemesanan lainnya.”

Bapak Asep Hendrawan selaku Bendahara Pengeluaran, juga menjelaskan biaya konsumsi dan lainnya apabila sudah terimplementasi pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Beliau mengatakan bahwa:

“Kalau untuk makan yang lain-lain kelihatannya masih menggunakan UP tunai ataupun LS. KKP perjalanan dinas baru kita rencanakan, kami rencanakan itu untuk pembayaran tiket dengan uang penginapan aja.”

Berdasarkan pada informasi di atas bahwa, pemesanan tiket yang selama ini BNPP RI lakukan dengan menghubungi atau mendatangi secara langsung ke maskapai penerbangan dengan melakukan transaksi secara langsung. Kemudian, apabila menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) juga masih tetap



menggunakan mekanisme belanja Uang Persediaan (UP) Tunai dan Langsung (Ls) untuk uang makan, saku, dan biaya sewa transportasi.

Hal tersebut tentunya dibandingkan menggunakan mekanisme yang berbeda membuat pembayaran menjadi membingungkan bagi BNPP RI. Berikut penjelasan dari Bapak Asep Hendrawan selaku Bendahara Pengeluaran. Beliau menjelaskan bahwa:

“...karena memang tadinya kami cukup merasa dengan UP Tunai sudah cukup, karena merasa KKP itu takutnya malah merepotkan. Tapi KKP yang 40% memang harus digunakan, untuk kedepannya mungkin kita pakai karena memang diwajibkan oleh Kementerian keuangan.”

Berdasarkan dari informasi diatas bahwa sebenarnya dari BNPP RI sendiri merasa sebelumnya sudah cukup dalam penggunaan Uang Persediaan (UP) Tunai. Terdapat kekhawatiran bahwa penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dapat merepotkan dan membingungkan. Akan tetapi, adanya kewajiban yang mengharuskan BNPP RI menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) itu sendiri, karena adanya anggaran untuk Kartu Kredit Pemerintah (KKP) itu sendiri, membuat BNPP RI wajib menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Berdasarkan eksplorasi yang telah peneliti lakukan, bahwa kecukupan dalam teori William N Dunn dalam Sugito dikatakan jika KKP sudah dapat memenuhi kebutuhan dari BNPP RI maka dinyatakan bahwa program tersebut memenuhi kecukupan pada dimensi ini.<sup>94</sup> Kecukupan juga mengacu kepada tercapainya tujuan dengan cara yang efisien dan efektif, serta meminimalkan dampak negatif yang tidak diinginkan.<sup>95</sup> Sehingga, dapat dikatakan bahwa Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sudah mencukupi kebutuhan BNPP RI karena dalam hal pembatasan limit di awal pemakaian selama 1 (satu) bulan senilai Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) per kartu dapat dimaksimalkan sesuai dengan ketersediaan limit BNPP RI dan bisa terus di revolving, dalam aksesibilitas kegunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) visa Platinum, Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang dapat terus

<sup>94</sup> William n Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, ed. by Muhadjir Darwin, 2nd edn (Gadjah Mada University Press).

<sup>95</sup> Wilson, James Q. (1989). *Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It*. New York: Basic Books.



di revolving dinilai sudah sangat mencukupi. Selain itu, jenis belanja yang mencukupi kegiatan kedinasan di BNPP RI.

#### 4.2.1.4 Perataan

Pada dimensi ini penulis akan membahas terkait perataan bisa dikatakan sebagai keadilan. Dalam evaluasi pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), perataan mencerminkan sejauh mana aksesibilitas Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ini merata serta memastikan seluruh bagian BNPP RI memegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Agar mengetahui lebih dalam, Pak Asep Hendrawan selaku Bendahara Pengeluaran mengatakan bahwa:

“Nah dulu itu untuk Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang 2019 itu memang kita Rencananya itu kita bagi rata ke seluruh BPP...”<sup>96</sup>

Beliau juga mengatakan bahwa:

“Saat ini hanya di Pusat sedangkan untuk di PLBN kelihatannya kita belum kasih untuk memegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ini, karena untuk dari segi kebutuhan besarnya departemen di Perbatasan ini belum.”<sup>97</sup>

“Untuk PLBN di bawah naungan BNPP RI di Deputy 1 (satu)”<sup>98</sup>

Berdasarkan pada informasi diatas bahwa Kartu Kredit Pemerintah di tahun 2019 – 2023 telah dibagikan secara merata juga dengan PLBN. Akan tetapi di tahun 2024 yang akan mendatang Kartu Kredit Pemerintah tidak akan dibagikan secara merata karena belum dirasa adanya kebutuhan mendesak untuk menggunakan Kartu Kredit Pemerinta.

Selaras dengan informasi diatas, Ibu Rizkia Kurniati sebagai pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) juga mengatakan bahwa:

“Dibagikan hanya kepada pegawai yang diberikan tanggung jawab dan kuasa terhadap pengelolaan keuangan di masing-masing komponen.”<sup>99</sup>

Kemudian, Ibu Hanesti selaku pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) juga mengatakan bahwa:

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Hendrawan, sebagai administrator dan Bendahara Pengeluaran (BP), 12 Januari 2023.

<sup>97</sup> Ibid.

<sup>98</sup> Ibid.

<sup>99</sup> Wawancara dengan Ibu Rizka Kurniati, Bendahara Pengeluaran Pembantu Asdep Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 05 Januari 2024.

“Betul dibagikan kepada masing-masing bendahara.”<sup>100</sup>

Berdasarkan dari informasi diatas bahwa Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI belum dibagikan secara merata di BNPP RI, terutama bagian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang berada di bawah naungan Deputi 1 (satu).

Selanjutnya, perataan juga diukur berdasarkan pada infrastruktur teknologi yang sudah merata atau belumnya di Wilayah Perbatasan. Kepala Bagian Keuangan di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia yaitu Ibu Herlina yang mewakilkan Bapak Indra Purnama selaku Kepala Biro Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di BNPP RI memberikan Informasi. Beliau mengatakan bahwa:

“...perlunya adanya peningkatan infrastruktur teknologi saja di Perbatasan.”<sup>101</sup>

Pernyataan tersebut sama halnya seperti yang dikatakan oleh pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), yaitu Ibu Rizkia Kurniati. Beliau mengatakan:

“...karena di Perbatasan pembayaran non-tunai belum merata secara luas hanya terbatas di Kota saja.”<sup>102</sup>

“infrastruktur teknologi di Perbatasan masih kurang sehingga diperlukannya sosialisasi yang lebih banyak lagi kepada pengusaha perbatasan untuk menerapkan sistem non-tunai, dengan demikian diharapkan pemanfaatan non-tunai di Perbatasan menjadi lebih meluas.”<sup>103</sup>

Informasi diatas dapat disimpulkan bahwa saat ini infrastruktur teknologi di Perbatasan belum memadai dan hanya sebatas di perkotaan saja, sehingga diperlukannya sosialisasi kepada pengusaha yang ada di Perbatasan untuk menerapkan sistem non-tunai. Berdasarkan pada wawancara dengan Ibu Risma selaku pemegang KKP di BNPP RI, beliau mengatakan:

“infrastruktur teknologi untuk transaksi non-tunai di wilayah perbatasan masih belum memadai. Meskipun di perkotaan sudah cukup baik, namun di perbatasan masih terbatas. Saya sering merasakan kendala dalam menggunakan KKP di wilayah perbatasan. Mesin EDC

<sup>100</sup> Wawancara dengan Ibu Hanesti, Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Keuangan, Umum, dan Humas dan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 08 Januari 2024.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Ibu Herlina, Kepala Bagian Biro Keuangan mewakilkan Bapak Indra selaku Kepala Biro Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 12 Januari 2023.

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ibu Rizka Kurniati, Bendahara Pengeluaran Pembantu Asdep Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 05 Januari 2024.

<sup>103</sup> Ibid.

untuk transaksi dengan KKP belum tersebar luas di sana, sehingga seringkali saya harus menggunakan uang tunai untuk pembayaran.”<sup>104</sup>

Dalam wawancara dengan Pemegang KKP BNPP RI, disoroti bahwa infrastruktur teknologi untuk transaksi non-tunai di wilayah perbatasan masih belum memadai. Meskipun di perkotaan infrastrukturnya sudah cukup baik, namun di wilayah perbatasan masih terbatas. Kendala yang sering dirasakan adalah terkait dengan ketersediaan mesin EDC yang digunakan untuk transaksi dengan KKP, yang belum tersebar luas di wilayah tersebut. Akibatnya, pengguna seringkali terpaksa menggunakan uang tunai untuk pembayaran.

Dari analisis tersebut, dapat dilihat bahwa pemerataan dalam akses dan pemanfaatan infrastruktur pembayaran non-tunai masih belum merata di wilayah perbatasan. Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan antara perkotaan dan wilayah perbatasan dalam hal ketersediaan infrastruktur teknologi transaksi. Ketidakmerataan ini dapat menjadi hambatan bagi efektivitas dan efisiensi penggunaan KKP di BNPP RI, terutama bagi mereka yang beroperasi di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan infrastruktur pembayaran non-tunai di wilayah perbatasan agar pemanfaatan KKP dapat berjalan lebih lancar dan efisien, serta mencapai pemerataan yang lebih baik dalam pelayanan publik.

Sama halnya juga dikatakan oleh Ibu Hanesti selaku pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya, infrastruktur teknologi di Perbatasan sangat terbatas apabila menggunakan transaksi non-tunai karena mesin EDC yang tidak semua diterapkan di usaha yang ada perbatasan.”<sup>105</sup>

Selaras dengan pernyataan diatas, Bapak Asep hendrawan selaku Bendahara Pengeluaran juga mengatakan bahwa:

“Sarananya sih tidak ada. Apalagi sekarang sistemnya itu tidak berbentuk hardcopy. Biasanya masukin nomor KK, kartu kredit pemerintah dan nomornya CVV yang di belakang itu yang tiga digit itu. Walaupun misalkan kita tidak ke tempat vendor misalkan ke travel, kami seringkali belinya online. Jadi sarana prasarana tidak banyak berpengaruh. Malah sekarang itu tidak perlu bawa kartu fisik, jadi lebih

<sup>104</sup> Wawancara dengan Ibu Risma Widi Utami selaku Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 23 Februari 2023.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Ibu Hanesti, Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Keuangan, Umum, dan Humas dan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 08 Januari 2024.

lebih efisien. Nah penggunaannya jadi tidak perlu bawa fisik, gak perlu ketemu dengan vendornya. Bisa by website atau Digipay, sudah itu bisa pakai CMS dan bisa pakai KKP. Jadi cukup menunjukkan dan memasukkan nomornya terus memasukan kode CVV, kalau untuk KKP ya. Kalau untuk CMS nya langsung dari rekening bendahara ke vendor.”<sup>106</sup>

“untuk saat ini sewa kendaraan belum bisa melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) masih melalui tunai, karena di Perbatasan masih jarang vendor yang memiliki mesin EDC, website, dan transaksi lainnya.”<sup>107</sup>

Berdasarkan dari informasi diatas bahwa infrastruktur teknologi di Perbatasan seperti mesin EDC tidak memiliki pengaruh yang signifikan, karena saat ini sudah ada sistem *mobile banking* dimana tidak diperlukan membawa kartu fisik. Akan tetapi pada kenyataannya, masih jarang vendor yang memiliki mesin EDC, website, dan transaksi lainnya. Sehingga, adanya kebutuhan peningkatan sosialisasi dan infrastruktur di wilayah perbatasan, yang mencerminkan ketimpangan dalam distribusi fasilitas dan layanan. Dengan demikian, diperlukannya sosialisasi terhadap pengusaha di Perbatasan atau vendor di Perbatasan untuk menerapkan sistem non-tunai di usahanya.

“Menurut pengalaman saya, meskipun saat ini sistem mobile banking sudah tersedia dan memungkinkan transaksi tanpa perlu membawa kartu fisik, namun keberadaan mesin EDC di wilayah perbatasan masih sangat terbatas. Hal ini tentu mempengaruhi penggunaan KKP di wilayah tersebut, karena masih banyak vendor atau pengusaha yang belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk transaksi non-tunai.”

Selanjutnya Ibu Risma Widi Utami pemegang KPP menambahkan:

“Sebagai pengguna, saya pikir ini adalah masalah yang serius yang perlu segera ditangani. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa masih banyak wilayah perbatasan yang tertinggal dalam hal teknologi pembayaran non-tunai. Dengan memperluas infrastruktur digital dan keuangan ke wilayah perbatasan, kita dapat mencapai perataan dalam pelayanan publik dan memastikan bahwa semua warga negara dapat mengakses layanan yang sama.”<sup>108</sup>

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Hendrawan, sebagai administrator dan Bendahara Pengeluaran (BP), 12 Januari 2023.

<sup>107</sup> Ibid.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Ibu Risma Widi Utami selaku Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 23 Februari 2023.

Dalam wawancara dengan Pengguna KKP BNPP RI, diungkapkan bahwa meskipun sistem mobile banking telah tersedia untuk melakukan transaksi tanpa perlu membawa kartu fisik, namun ketersediaan mesin EDC di wilayah perbatasan masih sangat terbatas. Kondisi ini berdampak pada penggunaan KKP di wilayah tersebut, karena banyak vendor atau pengusaha yang belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk transaksi non-tunai. Analisis dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan dalam akses dan pemanfaatan infrastruktur pembayaran non-tunai masih terjadi di wilayah perbatasan. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam penerapan teknologi pembayaran antara daerah perkotaan dan wilayah perbatasan. Kondisi ini dianggap sebagai masalah serius yang perlu segera ditangani, karena dapat menghambat efektivitas dan efisiensi penggunaan KKP di BNPP RI, terutama bagi mereka yang beroperasi di wilayah perbatasan.

Selanjutnya, pengguna KKP menambahkan bahwa pemecahan masalah ini membutuhkan upaya untuk memperluas infrastruktur digital dan keuangan ke wilayah perbatasan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai perataan dalam pelayanan publik dan memastikan bahwa semua warga negara dapat mengakses layanan yang sama. Analisis ini menegaskan pentingnya perbaikan infrastruktur pembayaran non-tunai di wilayah perbatasan untuk mencapai kesetaraan dalam akses layanan keuangan bagi seluruh warga negara.

Penekanan pada keterbatasan pembayaran non-tunai yang hanya merata di kota-kota besar menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan teknologi. Ini menyoroti kebutuhan untuk memperluas infrastruktur digital dan keuangan ke wilayah perbatasan untuk mencapai perataan dalam pelayanan publik. Kemudian, ketiadaan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) di beberapa usaha di wilayah perbatasan merupakan indikasi dari ketidakmerataan dalam akses terhadap teknologi pembayaran. Hal ini menggambarkan gap yang signifikan antara area perkotaan dan pedalaman di Perbatasan. Hal ini mengungkapkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan infrastruktur teknologi, khususnya dalam penerapan teknologi pembayaran non-tunai, untuk mencapai perataan yang lebih adil.



Berdasarkan paparan diatas bahwa diperlukannya sebuah strategi untuk meningkatkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI. Bapak Asep Hendrawan selaku Bendahara Pengeluaran, mengatakan bahwa:

“Kemungkinan sih kedepannya akan dilaksanakan. Terkait dengan vendor-vendor yang ada di Perbatasan, kita arahkan untuk menerapkan transaksi non-tunai terutama Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Maka Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ini biar istilahnya itu meminimalisir idle cash. Tapi dengan catatan perusahaan tersebut harus sudah terdaftar dan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kalau untuk belanja-belanja yang istilahnya itu yang dilakukan di daerah, sehingga nanti dari Uang Persediaan (UP) ini kan dibuat ada yang memungut pajaknya, itu mungkin secara online. Mungkin harus ada mesin EDC, tapi tidak tau mulai kapan karena perusahaannya di Perbatasan banyak yang perusahaannya belum terdaftar PKP...”<sup>109</sup>

Informasi diatas diketahui bahwa terlihat bahwa pemanfaatan transaksi non-tunai di Perbatasan, ada kecenderungan akan dilaksanakan di masa depan. Namun, terdapat kendala terkait perusahaan di Perbatasan yang banyak belum terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), menjadi hambatan untuk menerapkan transaksi non-tunai secara luas. Karena banyak perusahaan di Perbatasan belum terdaftar PKP. Hal ini menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam persiapan perusahaan di Perbatasan untuk mengadopsi transaksi non-tunai.

Berdasarkan eksplorasi yang telah peneliti lakukan bahwa perataan menurut William N Dunn dalam Sugito bahwa adanya sebuah keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak.<sup>110</sup> Hal tersebut juga sama dalam ungkapan Winarno bahwa perataan ialah sesuatu yang secara adil di distribusikan.<sup>111</sup> Berdasarkan pada teori tersebut bahwa perataan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI belum merata secara maksimal. Terlihat pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang belum menyentuh PLBN di wilayah perbatasan. Walaupun demikian, diketahui pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di wilayah perbatasan yang masih terbatas dipergunakan karena infrastruktur teknologi di wilayah perbatasan belum merata secara luas. Sehingga, apabila Kartu Kredit Pemerintah (KKP) juga diterbitkan untuk PLBN maka belum ada kebutuhan secara khusus untuk

<sup>109</sup> Ibid.

<sup>110</sup> William n Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, ed. by Muhadjir Darwin, 2nd edn (Gadjah Mada University Press).

<sup>111</sup> Winarno. (2002). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo, 2002



menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Di samping itu, belum adanya infrastruktur teknologi yang memadai dan masih asing nya penggunaan *digital payment* di wilayah perbatasan, di lihat masih banyaknya vendor yang belum menyediakan EDC untuk transaksi karena masih banyaknya usaha yang belum termasuk Perusahaan Kena Pajak (PKP).

#### 4.2.1.5 Responsivitas

Responsivitas pada dimensi ini dimaksud terkait apakah program dapat memuaskan kebutuhan dari sebuah kelompok. Pada dimensi responsivitas berdasarkan evaluasi pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah, bahwa apa yang dilakukan oleh BNPP RI atau pemerintah untuk mengatasi perubahan tersebut. Kemudian juga dilihat dari Kantor Pelayanan Pembayaran Negara (KPPN) mengatasi kendala yang terjadi di BNPP RI dan mendorong pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Kepala Bagian Keuangan di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia yaitu Ibu Herlina yang mewakilkan Bapak Indra Purnama selaku Kepala Biro Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di BNPP RI, mengatakan bahwa:

“kalau dari kami sampai saat ini belum pernah melakukan monev, jadi belum ada. Mungkin kedepannya kami akan melakukan monev tersendiri”<sup>112</sup>

Hal tersebut juga diatakan oleh Ibu Rizka Kurniati selaku Pegawai yang berkewenangan memegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Beliau mengatakan bahwa:

“Belum pernah melakukan monitoring dan evaluasi, saat itu di posisi masih WFH dan pandemic. Sehingga membuat kegiatan tidak berjalan seperti biasa.”<sup>113</sup>

Ibu Hanesti selaku Pegawai yang berkewenangan memegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), juga mengatakan bahwa:

“Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tidak pernah adanya monev”<sup>114</sup>

<sup>112</sup> Wawancara dengan Ibu Herlina, Kepala Bagian Biro Keuangan mewakilkan Bapak Indra selaku Kepala Biro Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 12 Januari 2023.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Ibu Rizka Kurniati, Bendahara Pengeluaran Pembantu Asdep Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 05 Januari 2024.

<sup>114</sup> Wawancara dengan Ibu Hanesti, Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Keuangan, Umum, dan Humas dan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 08 Januari 2024.

Berdasarkan pada informasi diatas bahwa KKP belum melaksanakan monitoring dan evaluasi, salah satu penyebabnya adalah adanya pembatasan social saat itu, sehingga kegiatan tidak berjalan lancar. Berikutnya, Bapak Dedy selaku pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang diwakilkan oleh Ibu Shaza Sekar, juga mengatakan bahwa:

“Belum pernah melakukan evaluasi terkait KKP di BNPP.”<sup>115</sup>

Lebih lanjut lagi, berdasarkan Bapak Asep Hendrawan selaku Bendahara Pengeluaran mengatakan bahwa:

“Belum, karena memang ini belum diimplementasikan, belum gerak sama sekali kan. Jadi pemanfaatannya juga belum terasa gitu yang selama ini, karena memang kemarin itu baru daftar aja tapi belum sempat digunakan jadi belum ada monitoring evaluasi nyari kemana. Kebetulan waktu pendaftaran awal itu dari bank nya juga ada kendala teknis di kartu kredit pemerintahnya itu tidak bisa diserahkan semua ke kami. Jadi kami memutuskan tidak memakai Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk sementara waktu. Nah baru mau diimplementasikan mungkin di tahun anggaran 2024...”<sup>116</sup>

Dari informasi diatas dikatakan bahwa sampai saat ini BNPP RI belum melaksanakan monitoring dan evaluasi secara internal karena belum terlaksananya Kartu Kredit Pemerintah di BNPP RI yang kebetulan juga adanya kendala dari bank sehingga tidak semua kartu dapat diserahkan ke BNPP RI.

Berdasarkan persoalan adanya kendala dari Bank Penerbit, Pak Deny selaku Pihak BNI sebagai Bank Penerbit mengatakan bahwa:

“ada kemungkinan kartu kredit terbawa ke satker lain karena adanya penerbitan secara serentak saat itu, akan tetapi apabila mereka tidak verifikasi maka tidak akan bisa diakivikasi.”<sup>117</sup>

Berdasarkan dari beberapa informasi yang peneliti dapatkan bahwa Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sampai saat ini belum melakukan monitoring dan evaluasi secara internal di BNPP RI. Sehingga tidak menjawabnya persoalan atau permasalahan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI. Selain itu, terdapat kendala adanya kekurangan Kartu Kredit Pemerintah yang tidak diterbitkan yang

<sup>115</sup> Wawancara dengan Ibu Shaza Sekar mewakili Bapak Dedy selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Asdep Infrastruktur Pemerintahan dan pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 22 Januari 2024.

<sup>116</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Hendrawan, sebagai administrator dan Bendahara Pengeluaran (BP), 12 Januari 2023.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Bapak Deny, Divisi Card Bisnis – Unit Corporat Card Product Development Bank Negara Indonesia (BNI), 22 November 2023.

dikarenakan adanya penerbitan yang dilakukan secara serentak membuat adanya kemungkinan Kartu Kredit Pemerintah terbawa oleh Kementerian/ Lembaga lain, tetapi apabila belum melakukan verifikasi Kartu maka tidak bisa diaktivasi dan kartu tidak dapat dipakai.

Selanjutnya diterangkan oleh Kepala Bagian Keuangan di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia yaitu Ibu Herlina yang mewakilkan Bapak Indra Purnama selaku Kepala Biro Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di BNPP RI terkait monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Beliau mengatakan bahwa:

“Kalau dari Kantor Pelayanan Pembayaran Negara (KPPN) sih ada, jadi monev dilakukan selama tiga bulan sekali. Jadi nanti kami dikirimkan gform untuk diisi oleh Bendahara Pengeluaran. Kalau lebih jelasnya mungkin Bendahara Pengeluaran yang lebih tahu.”<sup>118</sup>

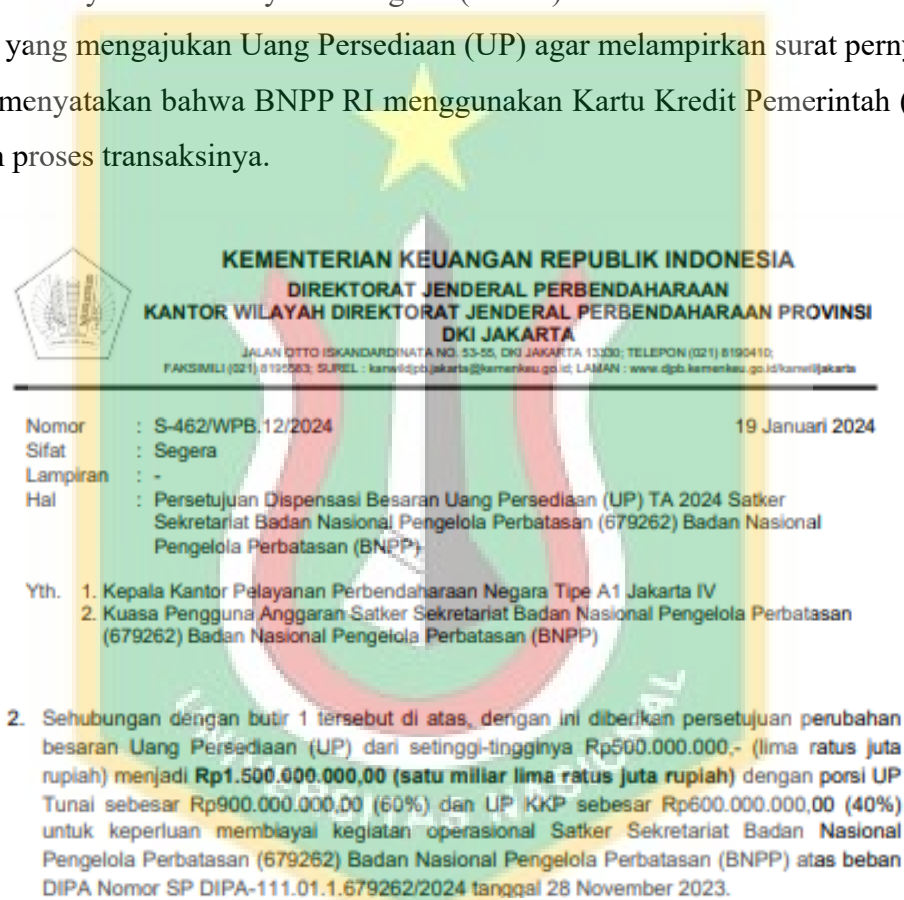
Berdasarkan informasi tersebut, dikatakan bahwa Kantor Pelayanan Pembayaran Negara (KPPN) telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Lebih jelasnya, Bapak Asep Hendrawan selaku Bendahara Pengeluaran di BNPP RI mengatakan bahwa:

“Tetapi kalau Kantor Pelayanan Pembayaran Negara (KPPN) memang ada untuk monitoring per triwulan untuk mengisi monitoring terkait dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dari mulai SP2D dan yang lain-lainnya harus mengisi wajib. Hanya karena Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ini belum pernah dipakai, jadi kami meskipun cuma nihil aja. Nah yang menilai pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) efektif apa engga, terus apakah menyalahi aturan apa engga, terus ada sanksi apa engga nanti yang menentukan Kantor Pelayanan Pembayaran Negara (KPPN). Selama ini sih baru monitoring aja, belum ada teguran dari Kantor Pelayanan Pembayaran Negara (KPPN), hanya Kantor Pelayanan Pembayaran Negara (KPPN) menghimbau kalau mengajukan Uang Persediaan (UP) lagi harus ada surat pernyataan akan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Untuk anggaran 2024 itu kemungkinan harus dilaksanakan karena ada surat pernyataannya. Nanti kalau misalkan ada satu kata tidak dilaksanakan, nanti akan dijadikan satu alat bahan untuk menagih kembali, bisa kena sanksi.”<sup>119</sup>

<sup>118</sup> Wawancara dengan Ibu Herlina, Kepala Bagian Biro Keuangan mewakilkan Bapak Indra selaku Kepala Biro Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 12 Januari 2023.

<sup>119</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Hendrawan, sebagai administrator dan Bendahara Pengeluaran (BP), 12 Januari 2023.

Dalam wawancara tersebut, terlihat jelas bahwa Kantor Pelayanan Pembayaran Negara (KPPN) menunjukkan responsivitasnya terhadap penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai strategi untuk memantau dan mengoptimalkan pemanfaatan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP). Meskipun saat ini pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) masih belum terlaksana sepenuhnya, Kantor Pelayanan Pembayaran Negara (KPPN) tetap konsisten dalam melakukan monitoring secara berkala setiap triwulan. Selain itu, Kantor Pelayanan Pembayaran Negara (KPPN) memberikan himbauan kepada pihak yang mengajukan Uang Persediaan (UP) agar melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa BNPP RI menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam proses transaksinya.



**Gambar 4.12** Surat Sanksi Tidak Digunakannya KKP di BNPP RI

*(Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, 2023)*

Dari hal tersebut, terlihat jelas bahwa Kantor Pelayanan Pembayaran Negara (KPPN) menunjukkan responsivitasnya terhadap penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai strategi untuk memantau dan mengoptimalkan pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Meskipun saat ini pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) masih belum terlaksana sepenuhnya, Kantor Pelayanan Pembayaran Negara (KPPN) tetap konsisten dalam melakukan

monitoring secara berkala setiap triwulan. Selain itu, Kantor Pelayanan Pembayaran Negara (KPPN) memberikan himbauan kepada pihak yang mengajukan Uang Persediaan (UP) agar melampirkan surat pernyataan yang menyatakan niat untuk menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam prosesnya.

Berdasarkan pada data tersebut dan informasi yang ada, bahwa BNPP RI telah terkena sanksi yang sebelumnya besaran Uang Persediaan satker perbulan senilai Rp.2.500.000.000,- (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) dengan rasio 60% (enam puluh persen) UP Tunai senilai Rp.1.500.000.000,- (*satu miliar lima ratus juta*) dan 40% (empat puluh persen) UP KKP senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) menjadi 60% (enam puluh persen) UP Tunai senilai Rp.900.000.000 (*Sembilan ratus juta rupiah*) dan 40% (empat puluh persen) UP KKP senilai Rp.600.000.000 (*enam ratus juta rupiah*). Hal tersebut menandakan adanya sanksi yang telah dilaksanakan oleh KPPN kepada Badan yang tidak menggunakan KKP.

Setelah eksplorasi yang lebih mendalam bahwa responsivitas berdasarkan William N Dunn dalam Sugito merupakan ketanggapan pemerintah akan adanya penyesuaian sebuah perubahan dengan cepat dan tanggap.<sup>120</sup> Hal yang sama dikatakan oleh Winarno bahwa responsivitas adalah sebuah respon dari sebuah kegiatan agar dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan program tersebut.<sup>121</sup> Berdasarkan pada dimensi responsivitas, dapat dinyatakan bahwa responsivitas terhadap pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) masih belum optimal. Keadaan ini disebabkan oleh kurangnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara internal oleh Badan Nasional Pengelolaan Pembiayaan Daerah (BNPP RI), sehingga berbagai permasalahan yang muncul belum dapat terselesaikan dengan baik.

Berdasarkan teori Michael Scriven, hasil analisis terhadap dimensi responsivitas menunjukkan bahwa responsivitas terhadap pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara internal oleh Badan Nasional Pengelolaan Pembiayaan Daerah (BNPP RI), yang menyebabkan berbagai

---

<sup>120</sup> William n Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, ed. by Muhadjir Darwin, 2nd edn (Gadjah Mada University Press).

<sup>121</sup> Winarno. (2002). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo, 2002



permasalahan yang muncul belum dapat terselesaikan dengan baik. Dengan demikian, kekurangan dalam mekanisme evaluasi internal di BNPP RI dan kurangnya responsivitas dari pihak KPPN menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap ketidakefektifan pemanfaatan KKP dalam konteks ini. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan responsivitas dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi secara internal agar pemanfaatan KKP dapat dioptimalkan sesuai dengan tujuannya.

#### 4.2.1.6 Ketepatan

Pada dimensi ketepatan berkaitan dengan hasil yang diinginkan dapat berguna atau bernilai. Berdasarkan pada dimensi ketepatan terkait evaluasi pemanfaatan di BNPP RI bahwa pada dimensi ini penulis akan membahas apakah program Kartu Kredit Pemerintah sudah tepat dilaksanakan di BNPP RI serta menghasilkan sesuatu hal yang berguna dan bernilai. Oleh karena itu, pada kriteria ini penulis mempertanyakan apakah program Kartu Kredit Pemerintah sudah tepat untuk mendorong sistem Kartu Kredit Pemerintah di BNPP RI agar tercapainya tujuan transaksi pembayaran yang modern. Agar dapat memperjelas dimensi ini, Kepala Bagian Keuangan di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia yaitu Ibu Herlina yang mewakilkan Bapak Indra Purnama selaku Kepala Biro Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di BNPP RI mengatakan bahwa:

“Kalau tepat atau tidaknya tentunya sudah tepat karena mempercepat pelaksanaan kegiatan...”<sup>122</sup>

Berdasarkan pada informasi diatas bahwa penerapan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI sudah terlaksana secara tepat, hal tersebut didasari bahwa pelaksanaan program Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, bahwa penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sudah baik apabila adanya sebuah kebutuhan mendesak atau kegiatan yang mendadak, sehingga pelaksana kegiatan dapat langsung melakukan kegiatannya.

<sup>122</sup> Wawancara dengan Ibu Herlina, Kepala Bagian Biro Keuangan mewakilkan Bapak Indra selaku Kepala Biro Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 12 Januari 2023.



Lebih lanjut, Bapak Asep Hendrawan selaku Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa:

“Kalau untuk transaksi non-tunai karena program pemerintah pasti sudah memperhitungkan. Jadi pokoknya tepat atau tidaknya itu tergantung nanti pemegang. Jadi istilahnya itu nanti akan diarahkan juga, mungkin dari bagian keuangan untuk mengingatkan pemanfaatan transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ini. Jadi untuk melakukan transaksi pembayaran perjalanan dinas minimal untuk tiket dulu. Jadi kalau untuk tiket sih Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sudah tepat.”<sup>123</sup>

Beliau juga mengatakan bahwa:

“Mungkin untuk catatan perjalanan Dinas kekurangannya belum bisa membayar untuk uang harian, uang saku, transport. paling masih menggunakan UP Tunai. Kelebihannya mungkin untuk KKP ini dapat bayar dulu walaupun uang UP nya belum keluar gitu. Misalkan uangnya belum ada, jadi semacam ditalangi dulu. Tidak perlu ada uang dulu kalau mau dinas yang penting tiket aja dulu.”<sup>124</sup>

Hal serupa informan yang peneliti dapatkan dari pegawai yang berkewenangan memegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), yaitu Ibu Rizkia Kurniati. Beliau mengatakan bahwa:

“Belum tahu karena belum pernah dilaksanakan. Tetapi infrastruktur teknologi serta kurangnya sosialisasi di BNPP membuat pelaksanaan KKP kurang optimal.”<sup>125</sup>

Ibu Hanesti selaku pegawai yang berkewenangan memegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) juga memiliki pendapat yang serupa. Beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya belum tepat, karena terbatasnya fasilitas transaksi non-tunai di Perbatasan membuat program Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tidak berjalan secara maksimal.”<sup>126</sup>

Berdasarkan pada informasi diatas bahwa Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sudah tepat karena pastinya dalam pembentukannya program tersebut sudah dipastikan diperhitungkan dengan baik. Perlunya usaha yang dilakukan oleh BNPP RI dalam peningkatan transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Dalam

<sup>123</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Hendrawan, sebagai administrator dan Bendahara Pengeluaran (BP), 12 Januari 2023.

<sup>124</sup> Ibid.

<sup>125</sup> Wawancara dengan Ibu Rizka Kurniati, Bendahara Pengeluaran Pembantu Asdep Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 05 Januari 2024.

<sup>126</sup> Wawancara dengan Ibu Hanesti, Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Keuangan, Umum, dan Humas dan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 08 Januari 2024.

pemanfaatan transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP), BNPP RI kedepannya akan mempergunakan untuk pembelian tiket pesawat.

Selain itu, berdasarkan informasi diatas juga bahwa Kartu Kredit Pemerintah (KKP) perjalanan dinas masih memiliki kekurangan karena jenis transaksi yang dapat dibayarkan melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) perjalanan dinas tidak meluas seperti tidak dapat dipergunakan untuk uang harian atau saku, kemudian tidak bisanya dipergunakan untuk sewa transportasi di wilayah perbatasan dan masih jarang nya penginapan yang mempergunakan mesin EDC atau transaksi non-tunai lainnya. Dengan demikian pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI hanya bisa dimanfaatkan sebagai pembelian tiket pesawat. Agar mengetahui lebih jelas, peneliti juga menanyakan terkait sistem pembayaran yang dilakukan oleh BNPP RI apabila menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Berikut penjelasan dari Bapak Asep Hendrawan selaku Bendahara Pengeluaran. Beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau untuk perjalanan dinas langsung ke vendor, seperti ke Garuda langsung atau ke maskapai penerbangan langsung bayar atau juga bisa melalui traveloka atau website pemesanan lainnya.”<sup>127</sup>

Bapak Asep Hendrawan selaku Bendahara Pengeluaran, juga menjelaskan biaya konsumsi dan lainnya apabila sudah terimplementasi pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Beliau mengatakan bahwa:

“Kalau untuk makan yang lain-lain kelihatannya masih menggunakan UP tunai ataupun LS. KKP perjalanan dinas baru kita rencanakan, kami rencanakan itu untuk pembayaran tiket dengan uang penginapan aja.”<sup>128</sup>

Berdasarkan pada informasi diatas bahwa, pemesanan tiket yang selama ini BNPP RI lakukan dengan menghubungi atau mendatangi secara langsung ke maskapai penerbangan dengan melakukan transaksi secara langsung. Kemudian, apabila menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) juga masih tetap menggunakan mekanisme belanja Uang Persediaan (UP) Tunai dan Langsung (Ls) untuk uang makan, saku, dan biaya sewa transportasi.

Hal tersebut tentunya dibandingkan menggunakan mekanisme yang berbeda membuat pembayaran menjadi membingungkan bagi BNPP RI. Berikut penjelasan

<sup>127</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Hendrawan, sebagai administrator dan Bendahara Pengeluaran (BP), 12 Januari 2023.

<sup>128</sup> Ibid.

dari Bapak Asep Hendrawan selaku Bendahara Pengeluaran. Beliau menjelaskan bahwa:

“...karena memang tadinya kami cukup merasa dengan UP Tunai sudah cukup, karena merasa KKP itu takutnya malah merepotkan. Tapi KKP yang 40% memang harus digunakan, untuk kedepannya mungkin kita pakai karena memang diwajibkan oleh Kementerian keuangan.”<sup>129</sup>

Berdasarkan dari informasi diatas bahwa sebenarnya dari BNPP RI sendiri merasa sebelumnya sudah cukup dalam penggunaan Uang Persediaan (UP) Tunai. Terdapat kekhawatiran bahwa penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dapat merepotkan dan membingungkan. Akan tetapi, adanya kewajiban yang mengharuskan BNPP RI menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) itu sendiri, karena adanya anggaran untuk Kartu Kredit Pemerintah (KKP) itu sendiri, membuat BNPP RI wajib menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Lebih lanjut, berdasarkan pendapat Bapak Asep Hendrawan selaku Bendahara Pengeluaran mengungkapkan saran untuk mengoptimalkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI agar dapat digunakan secara optimal. Beliau mengatakan bahwa:

“Saran saya sebagai bendahara pengeluaran kemungkinan akan menyarankan ke Kasubag Perbendaharaan, Kabag sampai dengan KPA. Bahwa untuk tahun ini harus menggunakan KKP karena memang sudah harus diimplementasikan dan diwajibkan oleh Kementerian Keuangan. Kemungkinan seperti itu. Nah untuk mendukung saran tersebut kemudian kita akan menyarankan juga untuk mengadakan sosialisasi terkait dengan penggunaan KKP. Ini berarti narasumbernya nanti mengundang dari KPPN. Dalam waktu dekat ini mungkin kami akan melaksanakan rapat-rapat untuk sosialisasinya dengan narasumber yang telah disebutkan tadi diatas.”<sup>130</sup>

Dari informasi diatas dapat dikatakan bahwa perlunya koordinasi kepada Kepala Sub Bagian, Kepala Bagian Keuangan, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk segera melaksanakan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI. Hal tersebut didasarkan kepada dorongan atas kewajiban penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) oleh Kementerian Keuangan. Sehingga diperlukannya sosialisasi kepada seluruh jajaran staf atau pegawai atau pejabat

---

<sup>129</sup> Ibid.

<sup>130</sup> Ibid.

BNPP RI agar memahami mekanisme pembayaran Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Berdasarkan pada wawancara dengan Ibu Risma selaku pemegang KKP di BNPP RI, beliau mengatakan:

“Menurut saya, salah satu cara untuk mengoptimalkan penggunaan KKP di BNPP RI adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan pelatihan kepada para pengguna. Banyak pegawai di BNPP RI mungkin belum sepenuhnya memahami potensi dan manfaat yang dapat diberikan oleh KKP. Oleh karena itu, dengan menyediakan pelatihan yang tepat dan memberikan informasi yang jelas tentang cara menggunakan KKP dengan efisien, kita dapat meningkatkan penggunaannya.” Saya pikir penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan KKP di setiap unit kerja di BNPP RI. Dengan cara ini, kita dapat mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul dalam penggunaan KKP dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya.”<sup>131</sup>

Dalam wawancara tersebut, Pengguna KKP BNPP RI menyampaikan pentingnya meningkatkan sosialisasi dan pelatihan kepada para pengguna KKP di BNPP RI. Analisis dari pernyataannya menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai terkait potensi dan manfaat KKP di BNPP RI dianggap sebagai langkah yang tepat. Dengan memberikan pelatihan yang tepat dan informasi yang jelas tentang cara menggunakan KKP secara efisien, diharapkan dapat meningkatkan penggunaannya. Berdasarkan pada wawancara dengan Ibu Risma selaku pemegang KKP di BNPP RI, beliau mengatakan:

“Menurut saya, kriteria yang berhak mendapatkan KKP seharusnya mencakup beberapa hal. Pertama, mereka harus menjadi pegawai negeri atau memiliki kedudukan yang setara di lembaga pemerintah. Kedua, mereka harus memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan atau anggaran di lembaga tersebut. Ketiga, mereka harus memiliki riwayat keuangan yang baik dan dapat dipercaya.”<sup>132</sup>

Dalam pernyataan tersebut, pengguna KKP BNPP RI menyatakan kriteria yang menurutnya seharusnya menjadi pertimbangan dalam penentuan siapa yang berhak mendapatkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Analisis terhadap pernyataan tersebut mengungkapkan beberapa poin penting terkait kecukupan kriteria yang berhak mendapatkan KKP. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya kriteria yang jelas dan ketat dalam penentuan siapa yang berhak mendapatkan KKP. Dengan

<sup>131</sup> Wawancara dengan Ibu Risma Widi Utami selaku Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 23 Februari 2023.

<sup>132</sup> Ibid.

memperhatikan aspek status kepegawaian, tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, dan riwayat keuangan yang baik, diharapkan penggunaan KKP dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam mendukung pengelolaan anggaran di lembaga pemerintah seperti BNPP RI.

Kepala Bagian Keuangan di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia yaitu Ibu Herlina yang mewakilkan Bapak Indra Purnama selaku Kepala Biro Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di BNPP RI terkait sumber daya manusia atau syarat untuk diberikan kewenangan memegang KKP, diketahui bahwa:

“Kriteria khusus hingga saat ini sih terserah KPA siapa yang ditunjuk, siapa yang akan memegang KKP tersebut. Yang penting masih dalam koridor dan berstatus pegawai BNPP.”<sup>133</sup>

Hal serupa yang dinyatakan oleh Bapak Asep Hendrawan selaku Bendahara Pengeluaran. Beliau mengatakan bahwa:

“Tidak ada sih, yang penting pegawai BNPP....”<sup>134</sup>

Dari informasi di atas, bahwa kriteria untuk menjadi pegawai yang memiliki kewenangan memegang Kartu Kredit Pemerintah adalah pegawai dan masih berada di dalam koridor BNPP RI. Lebih lanjut, pernyataan Ibu Rizka Kurniati selaku Pegawai yang berkewenangan memegang KKP. Beliau mengatakan:

“Kalau untuk syarat untuk pemegang KKP sih hanya pegawai yang memiliki status dan masih menetap serta bekerja sebagai pegawai BNPP RI.”<sup>135</sup>

Selanjutnya diperjelas oleh Bapak Dedy selaku pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang diwakilkan oleh Ibu Shaza Sekar. Beliau mengatakan bahwa:

“Tidak ada kriteria khusus”<sup>136</sup>

<sup>133</sup> Wawancara dengan Ibu Shaza Sekar mewakilkan Bapak Dedy selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Asdep Infrastruktur Pemerintahan dan pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 22 Januari 2024.

<sup>134</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Hendrawan, sebagai administrator dan Bendahara Pengeluaran (BP), 12 Januari 2023.

<sup>135</sup> Wawancara dengan Ibu Rizka Kurniati, Bendahara Pengeluaran Pembantu Asdep Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 05 Januari 2024.

<sup>136</sup> Wawancara dengan Ibu Shaza Sekar mewakilkan Bapak Dedy selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Asdep Infrastruktur Pemerintahan dan pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 22 Januari 2024.

Ibu Maslinda juga pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) mengatakan bahwa:

“Ya, terdapat beberapa syarat untuk menjadi pegawai yang berkewenangan memegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Perjalanan Dinas. Seperti, memiliki status sebagai PNS, NIP yang terdaftar di kepegawaian BNPP, serta bersih dari kasus tindak pidana sih.”<sup>137</sup>

Dari beberapa informasi di atas bahwa pemilihan pegawai yang berkewenangan memegang KKP tidak memiliki kriteria atau syarat khusus untuk menjadi pemegang KKP, syarat nya hanya satu yaitu sebagai pegawai BNPP RI.

Berdasarkan pada eksplorasi yang dilakukan peneliti bahwa ketepatan merujuk kepada teori William N Dunn dalam Sugito bahwa sejauh mana tingkat sasaran sehingga dapat memberikan hasil yang sesuai pada tujuan.<sup>138</sup> Hal yang sama juga dikatakan oleh Winarno bahwa ketepatan merupakan sebuah tingkat yang menunjukkan keakuratan dan kesesuaian suatu program dengan tujuannya.<sup>139</sup> Sehingga, dalam segi ketepatan pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI, dapat dikatakan belum tepat. Hal tersebut disebabkan Kartu Kredit Pemerintah yang di pegang oleh Bendahara Pengeluaran yang seharusnya di pegang oleh Ketua dalam kegiatan kedinasan di setiap bagian di BNPP RI. Sehingga, KKP dapat berjalan secara optimal.

---

<sup>137</sup> Wawancara dengan Ibu Maslinda, Pemegang Kartu Kredit Pemerintah di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), 22 Februari 2024.

<sup>138</sup> William n Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, ed. by Muhadjir Darwin, 2nd edn (Gadjah Mada University Press).

<sup>139</sup> Winarno. (2002). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo, 2002



No	DIMENSI EVALUASI (WILLIAM N DUNN)	HASIL PENELITIAN
1.	Efektivitas	<p>Berdasarkan pada eksplorasi yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa pada dimensi efektivitas dalam evaluasi pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) tidak berjalan secara efektif. Hal tersebut didasari karena belum diterapkannya program Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI, sehingga belum tercapainya kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan dan mencapai tujuan. Meskipun Kartu Kredit Pemerintah (KKP) memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengeluaran pemerintah, pemanfaatannya masih terhambat. Beberapa kendala mungkin menjadi penyebabnya, yaitu keterbatasan teknologi seperti EDC, kurangnya dorongan untuk menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan kurangnya sosialisasi atau penyuluhan agar memberikan pengetahuan kepada pegawai yang berkewenangan untuk memegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI. Namun, di tahun 2024, BNPP RI berencana untuk mendorong pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah</p>

		<p>(KKP) dengan strategi yang melibatkan dorongan seperti, surat resmi dan perintah resmi untuk melakukannya, serta sosialisasi yang lebih mendalam. Secara keseluruhan, paragraf tersebut menyimpulkan bahwa program Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI belum berjalan efektif dan memerlukan strategi untuk mendorong pemanfaatannya agar dapat mencapai tujuannya dengan lebih baik.</p>
2.	Efisiensi	<p>Berdasarkan eksplorasi yang dilakukan penulis, bahwa pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) berjalan secara efisien. Hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dapat dikatakan bahwa program Kartu Kredit Pemerintah (KKP) memberikan efisiensi pada transaksi keuangan negara karena memberikan percepatan pelaksanaan kegiatan dan terbebasnya dari biaya-biaya pungutan transaksi. Lalu, dalam hal efisiensi kecepatan pencairan dana dan biaya administrasi sudah baik. Karena dengan kecepatan pencairan dana dapat membuat pelaksanaan kegiatan menjadi lebih cepat juga dan terbebasnya biaya bunga membuat Kartu Kredit Pemerintah (KKP) menjadi lebih unggul daripada transaksi lainnya karena tidak adanya pungutan yang dilakukan oleh Bank Penerbit. Akan tetapi, Kartu</p>

		<p>Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI saat ini belum terlaksana sehingga Kartu Kredit Pemerintah (KKP) belum memberikan manfaat di BNPP RI, dengan demikian Kartu Kredit Pemerintah (KKP) belum memberikan dampak perubahan transaksi menjadi lebih efisien kepada BNPP RI. Disimpulkan bahwa, program Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI saat ini masih belum berjalan secara efisien.</p>
3.	Kecukupan	<p>Berdasarkan eksplorasi yang telah peneliti lakukan, bahwasanya KKP sudah mencukupi kebutuhan perjalanan dinas di BNPP RI, dalam aksesibilitas kegunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) visa Platinum, Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang dapat terus di revolving dinilai sudah sangat mencukupi. Selain itu, jenis belanja yang mencukupi kegiatan kedinasan di BNPP RI.</p>
4.	Perataan	<p>Berdasarkan eksplorasi yang telah peneliti lakukan bahwa perataan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI belum merata secara maksimal. Terlihat pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang belum menyentuh PLBN di wilayah perbatasan. Walaupun demikian, diketahui pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di wilayah</p>

		<p>perbatasan yang masih terbatas dipergunakan karena infrastruktur teknologi di wilayah perbatasan belum merata secara luas. Sehingga, apabila Kartu Kredit Pemerintah (KKP) juga diterbitkan untuk PLBN maka belum ada kebutuhan secara khusus untuk menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Di samping itu, belum adanya infrastruktur teknologi yang memadai dan masih asing nya penggunaan <i>digital payment</i> di wilayah perbatasan, di lihat masih banyaknya vendor yang belum menyediakan EDC untuk transaksi karena masih banyaknya usaha yang belum termasuk Perusahaan Kena Pajak (PKP).</p>
5.	Responsivitas	<p>Berdasarkan pada eksplorasi yang dilakukan peneliti bahwa dalam segi ketepatan pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI, dapat dikatakan belum tepat. Perlunya evaluasi dan monitoring secara internal serta melakukan sosialisasi kepada pegawai di BNPP RI dan vendor-vendor di Perbatasan agar mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan adanya kesadaran dan partisipasi vendor di Perbatasan membuat program pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Sehingga, BNPP RI dapat melaksanakan Kartu Kredit</p>

		Pemerintah (KKP) perjalanan dinas secara optimal.
6.	Ketepatan	Berdasarkan pada eksplorasi yang dilakukan peneliti bahwa dalam segi ketepatan pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI, dapat dikatakan belum tepat. Hal tersebut disebabkan Kartu Kredit Pemerintah yang di pegang oleh Bendahara Pengeluaran yang seharusnya di pegang oleh Ketua dalam kegiatan kedinasan di setiap bagian di BNPP RI. Sehingga, KKP dapat berjalan secara optimal.

**Tabel 4.2** Hasil Observasi Penelitian

